

# SENATOR



ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI II / APRIL 2025

## KHUSUS

Ketua DPD RI Dukung  
Evakuasi Warga Gaza  
ke Indonesia

10

# DARURAT SAMPAH DI DAERAH



Akses  
MAJALAH SENATOR  
Versi Digital  
Dewan Daerah Republik Indonesia

## NUSANTARA

HIV/AIDS di Aceh:  
Senator Serukan untuk  
Bertindak

14

## VARIA SENAT

Sikapi Kebijakan Impor AS:  
DPD RI Minta Pemerintah  
Siapkan Langkah Konkret

37

## WARISAN DAERAH

Blangkon:  
Warisan Leluhur  
di Ujung Kepala

52

# Mengatasi Krisis Sampah di Indonesia

Isu pengelolaan sampah di Indonesia kini semakin mendesak untuk diatasi, terutama di kota-kota besar seperti Pekanbaru, Banjarmasin, dan Lampung. Volume sampah yang terus meningkat, dipadukan dengan keterbatasan fasilitas pengelolaan, menjadikan masalah ini sangat krusial. DPD RI melihat pengelolaan sampah bukan hanya sebagai masalah kebersihan, tetapi juga keadilan sosial dan kesehatan masyarakat. Praktik pengelolaan sampah yang tidak efisien, seperti yang terjadi di Pekanbaru dengan pungutan liar, memperburuk kondisi lingkungan dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Keterbatasan lahan untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA) juga menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan di berbagai daerah. Di Banjarmasin, misalnya, penutupan TPA yang menggunakan sistem *open dumping* telah menyebabkan krisis sampah yang kian memburuk. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera beralih dari ketergantungan pada TPA terbatas dengan menerapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Pemilahan sampah sejak awal dan pengelolaan yang ramah lingkungan adalah langkah penting yang perlu diperhatikan.

Untuk mengatasi masalah sampah secara efektif, kerjasama lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. Salah satu

solusi yang mulai diterapkan di beberapa daerah adalah teknologi *waste-to-energy*. Seperti yang direncanakan di Lampung, teknologi ini mengolah sampah menjadi energi terbarukan, yang tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga mendukung keberlanjutan energi bersih di Indonesia. Inisiatif ini dapat menjadi model bagi daerah lainnya yang menghadapi masalah serupa.

DPD RI juga mendukung langkah-langkah preventif, seperti pendidikan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, yang sangat penting untuk mengurangi beban di TPA. Program desa mandiri sampah yang dilaksanakan di Jawa Tengah menjadi contoh positif, di mana masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya daur ulang.

Sebagai bagian dari upaya ini, pengelolaan sampah harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah. DPD RI akan terus mendorong agar pemerintah pusat dan daerah mempercepat implementasi solusi berbasis teknologi dan memberikan insentif bagi daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dengan komitmen bersama dan langkah-langkah nyata, kami berharap masalah sampah yang selama ini menjadi beban dapat segera teratasi, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. (\* / Mas Aryo Kristiyanto)

**SENATOR**  
MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

**PENASEHAT:** Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **PENANGGUNGJAWAB:** Mahyu Darma  
**PEMIMPIN REDAKSI:** Heru Firdan; **REDAKTUR PELAKSANA:** Budi Fitra Helmi; **REDAKTUR FOTO & GRAFIS:** Agus Wiharto; **EDITOR SENIOR:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **TIM PENULIS ARTIKEL:** Heru Firdan, Budi Fitra Helmi, Intan Fitria Yuliani, Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah

## KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270. Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah\_senator@dpd.go.id // website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

# Dealing with Garbage Crisis in Indonesia

Garbage management issues in Indonesia today have become more urgent to be resolved, particularly in big cities such as Pekanbaru, Banjarmasin, and Lampung. The ever-increasing volume of garbage, combined with limited management facilities, becomes a very crucial problem. DPD RI perceives that garbage management is not only a cleanliness issue but it also involves social justice and public health. Inefficient garbage management, such as what happens in Pekanbaru which involves extortion, has worsened the environment and aggravated the community confidence toward government in dealing with the issues.

Limited area for final garbage dump (TPA) is also becoming a growing concern in many areas. In Banjarmasin, for instance, the closing of TPA using open dumping system has caused garbage crisis to be more alarming. Therefore, local administration should urgently switch from being dependent on limited TPA into applying a more integrated garbage management system. Early garbage sorting and environmentally friendly management are essential steps that require close attention.

To deal with garbage issues effectively, cross-sectoral coordination among central government, local administration, private sectors, and communities is essentially necessary. One of the solutions that begins to

be applied in a number of areas is waste-to-energy technology. As planned in Lampung, the technology processes garbage into renewable energy which does not only reduce garbage volume but also support continuing supply of clean energy in Indonesia. The initiative can be a role model for other areas facing similar situation.

DPD RI also supports preventive actions, such as educating garbage sorting in households which is essentially important to lessen the burden of TPA. Garbage independent village program implemented in Central Java becomes a positive model whereby the society is directly involved in managing garbage as it improves collective awareness of the importance of recycling

As part of the endeavour, garbage management should be a priority in area development agenda. DPD RI will keep encouraging the central and local government to expedite implementing technology-based solution and provide incentives to successful areas which implement environmental-friendly garbage management system. Under common commitment and real steps we sincerely hope to overcome garbage issues which so long have been such a burden, that we be able to create a sustainably cleaner and healthier environment for future generation. (**\*/Mas Aryo Kristiyanto**)

# DARURAT SAMPAH DI DAERAH

Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Agita Nurfianti, menyebutkan bahwa masalah sampah di berbagai wilayah sudah masuk dalam kategori darurat.

**Betria Eriani**

Penulis

**S**ampah, masalah klasik yang terus menghantui hampir seluruh daerah di Indonesia, kini telah mencapai titik kritis. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika dampak buruknya terlihat nyata di daerah-daerah yang mengalami kebakaran dan longsor sampah.

“Meski aturan terkait pengelolaan sampah sudah ada, namun implementasinya masih lemah. Masih banyak masyarakat yang belum patuh, dan penegakan hukum juga kurang tegas,” ujar Agita dalam rapat Pembahasan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Sub Wilayah Barat II pada Senin (14/4/2025).

Dalam pengamatannya selama kunjungan reses, Agita menyoroti betapa seriusnya masalah sampah di daerah pemilihannya, Jawa Barat (Jabar), di mana penumpukan sampah menyebabkan kebakaran dan longsor. Kondisi tersebut, menurutnya, adalah peringatan keras bahwa pengelolaan sampah harus segera menda-



Anggota DPD RI dari Sub Wilayah Barat II usai rapat membahas permasalahan sampah di daerah pemilihan masing-masing. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

patkan perhatian lebih.

Meskipun undang-undang, peraturan daerah, serta rancangan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah sudah ada, faktanya di lapangan, implementasinya belum maksimal. Agita menekankan bahwa hal ini perlu segera diatasi dengan dukungan nyata dari pemerintah dan masyarakat, baik melalui pengawasan, pelatihan, maupun penyediaan peralatan yang memadai.

Salah satu langkah yang sedang dijajaki Pemerintah Kota Bandung adalah kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan alat pemusnah sampah minim emisi. “Alat ini menggunakan teknologi pemanasan, bukan pembakaran yang menghasilkan asap. Ini adalah inovasi yang lebih ramah lingkungan

dan bisa diadopsi oleh kota-kota lain di Indonesia,” ungkap Agita.

Agita berharap, teknologi ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Namun, untuk itu dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan pengadaan alat pemusnah sampah modern di seluruh kota. “Pengelolaan sampah yang efektif harus menjadi prioritas nasional. Kita tidak bisa menunggu sampai keadaan semakin parah,” tegasnya.

Sampah bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Sekarang saatnya tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini, demi masa depan yang lebih bersih dan sehat. (\*)

# Setiap Daerah Perlu Membuat *Roadmap* Pengelolaan Sampah

M. Fathoni

Penulis

**M**enyikapi permasalahan sampah yang terjadi di daerah, keempat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat kerja dengan instansi terkait di Kantor DPD RI Provinsi DIY, Selasa (8/4/2025). Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah.

GKR Hemas dalam rapat tersebut menyebutkan bahwa munculnya permasalahan sampah di daerah disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, kurangnya sinkronisasi antarperaturan. *Kedua*, lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan. *Ketiga*, minimnya *political will* dari pemerintah kabupaten/kota dalam menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas pembangunan.

“Keberadaan regulasi daerah seperti peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pengelolaan sampah menjadi instrumen hukum



Anggota DPD RI dari DIY menggelar rapat kerja dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda Pengelolaan Sampah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

yang sangat penting untuk mengatur kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat lokal,” kata GKR Hemas, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI.

Menurutnya, evaluasi terhadap perda dan raperda pengelolaan sampah harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan, mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi, serta memberikan solusi konkret terhadap permasalahan sampah. Mulai dari penguangan, pemilahan, daur ulang, hingga pengelolaan akhir yang berkelanjutan.

“Saya mengajak semua pihak untuk berdiskusi secara konstruktif dan memberikan masukan yang kom-

prehensif, agar kebijakan yang kita evaluasi hari ini benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat DIY,” ujar GKR Hemas.

Lebih lanjut, GKR Hemas menekankan kepada setiap pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyusun *roadmap* manajemen pengelolaan sampah di wilayah masing-masing, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. *Roadmap* tersebut perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti lonjakan jumlah penduduk, peningkatan kunjungan wisata baik di musim libur maupun hari biasa, serta percepatan pembangunan.

(\*)

# Pengelolaan Sampah Belum Terintegrasi Antardaerah

Fandi Tri Prayogo

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad, menyayangkan belum terintegrasinya pengelolaan sampah antarkabupaten/kota. Padahal menurutnya, penanganan sampah memerlukan komitmen bersama yang jelas mengenai apa yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota dan apa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Sekilas tadi terlihat tidak ada koordinasi. Bahkan ada kabupaten yang tidak berkenan ketika dikirim sampah. Jadi perlu adanya koordinasi yang dipimpin oleh provinsi agar komitmen menyelesaikan persoalan sampah ini bisa benar-benar tercapai,” ujar Hilmy dalam rapat kerja Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda Pengelolaan Sampah di Kantor DPD RI Provinsi DIY, Selasa (8/4/2025). Rapat tersebut diikuti oleh keempat senator dari DIY.

Senator Ahmad Syauqi Soeratno menilai pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam pengelolaan sampah, agar dapat menghasilkan pola penanganan



Keempat anggota DPD RI dari DIY dalam rapat kerja Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda tentang pengelolaan sampah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

yang terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan komprehensif ini, menurutnya, harus menekankan nilai-nilai budaya, ekonomi, dan pemanfaatan teknologi.

“Perlu mengubah perspektif bahwa sampah adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, sehingga harus dikelola dengan baik. Dengan begitu, pengelolaan sampah bisa menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas (*circular economy*). Untuk itu, penggunaan teknologi saat ini tak bisa dihindari,” ujar Syauqi.

Sementara itu, Senator RA Yashinta Sekarwangi Mega mengusulkan pelibatan mahasiswa yang sedang menjalankan Kuliah

Kerja Nyata (KKN) untuk membantu mengatasi persoalan sampah di desa-desa tempat mereka bertugas. “Kami mendukung program KKN tematik sebagai upaya sinergi yang konkret,” katanya.

Senator GKR Hemas mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi masyarakat, akademisi, pihak swasta, hingga organisasi lingkungan dan masyarakat umum sebagai subjek pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya pendekatan manajemen yang komprehensif dengan mempertimbangkan unsur budaya, ekonomi, dan teknologi dalam setiap tahapan pengelolaan. (\*)

# Perlu Kesadaran Kolektif dalam Pengelolaan Sampah

Theresia Oktavina

Penulis

**S**alah satu isu yang menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, Eva Susanti, adalah persoalan penanganan sampah, terutama pasca Lebaran. Peningkatan volume sampah setelah momen hari raya merupakan fenomena tahunan yang harus diantisipasi dengan perencanaan yang matang oleh pemerintah daerah.

“Jika tidak dikelola secara serius, tumpukan sampah bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga bisa menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang lebih kompleks,” kata Eva saat melakukan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (8/4/2025). Ia menegaskan perlunya solusi konkret yang tidak hanya terbatas pada penambahan armada atau tenaga kebersihan, tetapi juga menasar perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi dan pelibatan aktif warga.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda reses dalam rangka menyerap aspirasi daerah dan masyarakat. Eva disambut oleh Pelaksana Harian Kepala



Anggota DPD RI Eva Susanti (tengah) saat pertemuan di Kantor DLH OKI. (Foto Istimewa)

Dinas Lingkungan Hidup OKI, Alamsyah, bersama sejumlah kepala bidang dan staf di lingkungan DLH Kabupaten OKI.

Dalam pertemuan itu, Eva menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dan sistematis dalam pengelolaan sampah. Ia mendorong penguatan sistem terpadu, peningkatan fasilitas daur ulang, serta penyusunan regulasi daerah yang mendukung upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. “Masalah sampah bukan sekadar urusan angkut dan buang. Ini tentang membangun kesadaran kolektif dan menyediakan insentif untuk solusi berbasis komunitas,” ujarnya.

Eva juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat, untuk berkolaborasi mewujudkan OKI yang bersih dan sehat.

Menurutnya, sinergi lintas sektor merupakan kunci untuk menjawab tantangan lingkungan secara menyeluruh. “Saya optimistis, jika semua pihak mau bergerak bersama, OKI bisa menjadi contoh kabupaten yang berhasil dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Ini kerja besar, tapi bukan mustahil,” tambahnya.

Di akhir kunjungan, Senator Komite II DPD RI itu menyampaikan apresiasi kepada para petugas lapangan yang telah bekerja keras menangani tumpukan sampah, khususnya setelah momen Idulfitri. Ia berkomitmen membawa aspirasi dan temuan di lapangan ini ke tingkat pusat, khususnya dalam pembahasan kebijakan lingkungan dan alokasi anggaran bagi daerah-daerah yang menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan sampah. (\*)

# Masalah Sampah di Daerah Menjadi Perhatian DPD RI

Rini Sumarni

Penulis

**B**adan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan perhatian serius terhadap persoalan pengelolaan sampah yang semakin kompleks di berbagai daerah. Masalah persampahan kini tidak lagi sekadar isu lokal, melainkan telah menjadi masalah nasional yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan.

Hal ini mengemuka dalam rapat pleno BULD DPD RI yang digelar pada Rabu (16/4/2025), dengan agenda khusus membahas hasil pemantauan anggota DPD RI serta penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah terkait penanganan dan pengelolaan sampah.

“Permasalahan sampah di berbagai wilayah menjadi perhatian utama BULD DPD RI,” ujar Ketua BULD DPD RI, Stefanus BAN Liow.

Berdasarkan hasil peninjauan aspirasi para senator, permasalahan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Banyak daerah masih kekurangan fasilitas seperti tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), dan tempat pengola-



Pimpinan BULD DPD RI dalam rapat pleno membahas hasil pemantauan anggota DPD RI terkait masalah sampah di daerah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

han sampah terpadu (TPST).

Selain itu, meningkatnya jumlah timbunan sampah akibat pertambahan penduduk dan konsumsi masyarakat, rendahnya kesadaran publik dalam membuang sampah pada tempatnya, serta minimnya kegiatan daur ulang dan pemilahan sampah turut memperparah situasi. Dampak lingkungan dan ekologis, lemahnya regulasi, serta penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi faktor yang perlu dibenahi.

Rapat tersebut juga mencatat bahwa upaya pemerintah daerah dalam menangani sampah umumnya mengikuti pola seragam dengan pendekatan yang beragam, seperti regulasi, teknis, edukasi, dan partisipatif. Sejumlah daerah telah menerbitkan regulasi daerah, seperti Peraturan

Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019.

Di sisi teknis, langkah yang diambil mencakup pembangunan dan penyediaan infrastruktur seperti TPS, TPA regional, *sanitary landfill*, serta pengadaan armada pengangkut sampah. Beberapa daerah juga mulai memanfaatkan teknologi, seperti fasilitas pemusnah sampah dan pembangunan *Refuse Derived Fuel (RDF) Plant*, seperti yang telah diterapkan di Rorotan, Jakarta.

Melalui forum ini, BULD DPD RI mendorong sinergi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat regulasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah secara lebih terpadu dan berkelanjutan. (\*)

# Masyarakat Kurang Peduli dalam Pengelolaan Sampah

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**P**ermasalahan pengelolaan sampah yang muncul di berbagai daerah disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya regulasi, minimnya infrastruktur sarana dan prasarana, hingga rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih marak terjadi.

“Karena itu, pembentukan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menangani sampah merupakan aspek yang sangat penting, yaitu melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi sejak dini. Selain itu, perlu penerapan teknologi dan penguatan infrastruktur pengolahan sampah dari hulu ke hilir,” ujar Ketua BULD DPD RI, Stefanus BAN Liow, dalam Rapat Pleno BULD DPD RI, Rabu (16/4/2025), yang khusus membahas hasil pemantauan anggota DPD RI serta penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah tentang penanganan dan pengelolaan sampah.

Dalam rapat tersebut, sejumlah senator menyam-



Pimpinan dan anggota BULD DPD RI usai menggelar rapat pleno. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

paikan pandangan kritis terkait kondisi pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Anggota BULD dari Aceh, Sudirman Haji Uma, menilai bahwa diperlukan regulasi yang komprehensif dan disertai dengan sistem *reward and punishment* agar penegakan aturan berjalan efektif. “Tidak efektif hanya dengan imbauan. Jadi perlu ada penghargaan bagi yang patuh dan sanksi bagi yang melanggar,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh Habib Said Abdurrahman, senator asal Kalimantan Tengah. Ia menyoroti kebiasaan masyarakat di wilayahnya yang masih membuang sampah di kolong rumah panggung. Sementara itu, senator dari Jawa Tengah, Muhti, juga menekankan pentingnya penegakan atur-

an yang disertai sanksi. “Ada peraturan tapi tidak ada hukuman, penegakannya tidak mungkin efektif,” ujarnya.

Senator asal Sumatera Barat, Jelita Donal, menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat sebagai kunci keberhasilan pengelolaan sampah. Sementara itu, senator asal Sumatera Selatan, Ratu Tenny Leriva, menyoroti upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini melalui penerbitan peraturan daerah sebagai bentuk komitmen terhadap isu lingkungan.

Rapat pleno ini menjadi forum strategis bagi BULD DPD RI untuk menghimpun masukan dari berbagai daerah guna mendorong kebijakan nasional yang lebih responsif dan holistik dalam mengatasi persoalan sampah. (\*)

# Ketua DPD RI Dukung Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina ke Indonesia mendapat tanggapan pro-kontra dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Namun Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mendukung rencana Presiden tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, rencana ini harus didukung oleh semua elemen bangsa.

**Arso P. Nugroho**

Penulis

**M**enurut Sultan, yang juga merupakan Dewan Pembina Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), kondisi Gaza saat ini sangat memprihatinkan akibat perang. Kerusakan besar yang terjadi di Gaza menyebabkan banyak warga yang menderita gangguan kesehatan dan kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu, upaya evakuasi warga Gaza ke Indonesia harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung keinginan Presiden Prabowo untuk mengevakuasi para korban perang Gaza untuk sementara waktu. Wacana ini bisa



Warga Palestina di Gaza mengungsi ke kota-kota terdekat, menyusul perintah evakuasi yang dikeluarkan militer Israel pada 11 April 2025. (Foto AFP/Kompas)

menjadi pemicu bagi para pemimpin negara Arab dan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) lainnya untuk melakukan hal serupa,” ujar Sultan, Sabtu (12/4/2025).

Meski demikian, Sultan mengingatkan agar pemerintah tetap selektif dalam proses evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebaiknya, prioritas diberikan kepada wanita renta dan anak-anak. Mereka perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan sementara di luar Palestina, termasuk akses layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, hingga saatnya mereka dapat kembali ke Gaza.

Sultan juga mengusulkan agar negara-negara yang tergabung dalam OKI berkolaborasi untuk membangun pemukiman terintegrasi bagi

warga Gaza di wilayah Mesir. “Pemukiman terintegrasi sementara perlu dibangun di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keberlangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat Gaza. Pemukiman tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hiburan,” kata Sultan.

Pada Rabu (9/4/2025), Presiden Prabowo mengumumkan bahwa Indonesia siap menerima 1.000 warga Gaza dalam gelombang pertama. Mereka akan tinggal di Indonesia sementara waktu hingga kondisi kesehatan mereka pulih. Ketika mereka sudah sembuh dan situasi di Gaza memungkinkan, mereka harus kembali ke negara mereka. (\*)

# Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Senator: Fokuskan Anak Yatim Piatu



Anggota DPD RI Lia Istifhama

## Lela Sadiyah

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama, menegaskan bahwa Indonesia dapat berperan dalam isu kemanusiaan global dengan pendekatan yang terfokus dan terukur. Oleh karena itu, dia mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia.

Senator dari Jawa Timur itu mengingatkan, evakuasi ini bukanlah bentuk relokasi permanen atau perpindahan kewarganegaraan, melainkan suaka sementara dalam konteks kemanusiaan. Palestina tetap merupakan negara berdaulat, dan evakuasi tersebut harus dipahami sebagai bantuan jangka pendek Indonesia terhadap warga Palestina yang terdampak perang.

Lia juga mengingatkan bahwa Indonesia belum

“Meski demikian, Indonesia tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlindungan bagi warga negara asing dalam kondisi darurat. Posisi hukum kita jelas, kita bukan negara penampung permanen. Kita bersifat transit dan kemanusiaan. Mereka tidak bisa diizinkan bekerja secara legal di sini.”

Anggota DPD RI,  
Lia Istifhama

meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 di bawah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Oleh karena itu, pencari suaka di Indonesia tidak memiliki hak untuk bekerja secara legal, dan keha-

diran mereka bersifat sementara. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tahun 2016, status pengungsi atau pencari suaka tidak memberikan hak kerja, melainkan hanya perlindungan dasar selama mereka berada di Indonesia.

“Meski demikian, Indonesia tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlindungan bagi warga negara asing dalam kondisi darurat. Posisi hukum kita jelas, kita bukan negara penampung permanen. Kita bersifat transit dan kemanusiaan. Mereka tidak bisa diizinkan bekerja secara legal di sini,” ujar Ning Lia, demikian dia biasa disapa, baru-baru ini.

Lia mengingatkan bahwa evakuasi warga Palestina tersebut difokuskan pada anak-anak yatim piatu korban perang yang sudah tidak memiliki orang tua lagi. Mereka akan diberikan akses pendidikan dan pemulihan trauma dalam lingkungan yang aman. Setelah situasi di Gaza membaik, mereka harus dikembalikan ke negara mereka.

“Ini bukan perpindahan kewarganegaraan, tapi hanya suaka sementara. Fokusnya pada anak-anak yatim piatu, untuk diberi akses pendidikan yang layak di Indonesia. Setelah situasi di Gaza membaik, mereka akan dikembalikan ke negara mereka. Jangan sampai dipersepsikan seolah Palestina sudah tidak ada,” kata Lia Istifhama. (\*)

# Senator Ria Tolak Rencana Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

Adhi Nugroho

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ria Saptarika, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Pemerintah Indonesia yang akan mengevakuasi warga Gaza, Palestina. Dia menilai, pemindahan penduduk Gaza bukanlah solusi atas konflik berkepanjangan di wilayah tersebut, melainkan justru mengancam kedaulatan dan masa depan rakyat Palestina.

“Evakuasi penduduk Gaza sama sekali tidak dapat diterima sebagai solusi. Ini bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga menyangkut eksistensi dan identitas bangsa Palestina di tanah airnya sendiri,” tegas senator dari daerah pemilihan Kepulauan Riau itu, dalam Sidang Paripurna DPD RI, Selasa (15/4/2025).

Dia menilai pemindahan warga Gaza tersebut akan semakin memperburuk kondisi yang ada di Palestina dan tidak menyentuh akar masalah konflik. Karena itu, dia menyerukan kepada semua pihak untuk mendorong penyelesaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dengan mengevakuasi warga Gaza, dia mengkhawatirkan akan membuka jalan bagi Israel untuk men-



Anggota DPD RI Ria Saptarika (Foto Doc. Ist)

guasai Gaza. “Upaya penyelesaian konflik harus mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemindahan ini justru membuka jalan bagi penguasaan penuh Zionis Israel atas wilayah Gaza,” katanya.

Senator dari Lampung, Abdul Hakim, juga menolak rencana evakuasi warga Gaza tersebut. Menurutnya, Indonesia seharusnya terus menyuarakan penghentian genosida Israel terhadap warga Gaza, bukan dengan mengevakuasi warganya. “Mengevakuasi warga Gaza ke negara lain, termasuk Indonesia, adalah bentuk

ketidakmampuan internasional dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan. Evakuasi ini merupakan persembunyian di balik alasan kemanusiaan,” kata Hakim.

Hakim menegaskan, genosida atau pembersihan etnis oleh Israel jelas melanggar konvensi hak asasi manusia (HAM) dan mengancam eskalasi perdamaian dunia serta memicu terjadinya Perang Dunia III. Karena itu, ia mendesak Pemerintah Indonesia untuk terus melobi internasional agar menghentikan agresi Israel di tanah Gaza, Palestina, ketimbang mengusung ide evakuasi. (\*)

Presiden Prabowo Subianto:

# Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Permintaan Komunitas Internasional

Nanda Russia Rola

Penulis

**P**residen Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia. Rencana tersebut akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza.

Terkait rencana ini, Presiden Prabowo sengaja mengunjungi lima negara di kawasan Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania, untuk berkonsultasi dengan para pemimpin negara masing-masing. Hal ini dilakukan karena Prabowo terus menerima telepon dan utusan yang menanyakan kesiapan Indonesia untuk membantu situasi di Gaza.

“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui dan mereka akan berada di sini hanya sementara hingga kondisi mereka pulih. Setelah mereka pulih dan kondisi di Gaza memungkinkan, mereka harus kembali. Saya kira itu adalah sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus melakukan konsultasi dengan para pemimpin ne-



Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan pers sebelum mengunjungi lima negara di Timur Tengah. (Foto Setpres)

gara tersebut,” kata Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/3/2025).

Presiden juga mengungkapkan bahwa rencana ini bertujuan untuk menindaklanjuti permintaan komunitas internasional yang menilai Indonesia perlu berperan lebih aktif, mengingat Indonesia adalah negara nonblok dan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia dianggap dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Prabowo mengakui bahwa langkah ini tidaklah mudah dan memerlukan perhatian serius, namun komitmen Indonesia untuk mendukung keselamatan rakyat Palestina

dan mendukung kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas. “Saya kira, posisi ini membuat kita memiliki tanggung jawab, karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap berperan, bila diminta oleh semua pihak, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia,” ujar Prabowo.

Sejauh ini, Indonesia telah mengirimkan bantuan berupa makanan, alat kesehatan, obat-obatan, pakaian, dan air bersih untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza. Indonesia juga telah mengirimkan dokter dan tenaga kesehatan, serta kapal rumah sakit KRI dr Radjiman Wedyodiningrat yang telah sandar di El Arish untuk beberapa bulan dan merawat korban perang dari Gaza. (\*)

# HIV/AIDS di Aceh: Senator Serukan untuk Bertindak

**Fandi Tri Prayogo**

Penulis

**M**eningkatnya kasus HIV/AIDS di Banda Aceh memantik keprihatinan mendalam dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Darwati A Gani. Dengan suara yang tegas namun penuh empati, Darwati menyampaikan kegelisahannya atas lonjakan angka penderita, terutama di kalangan usia produktif. Lebih dari separuh kasus tersebut disebabkan oleh perilaku hubungan sesama jenis, terutama lelaki seks lelaki (LSL). Bagi Darwati, data ini bukan sekadar statistik, melainkan peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Saya melihat ini sebagai alarm kemanusiaan dan sosial yang harus disikapi dengan serius dan menyeluruh,” ungkap Darwati, mengutip laporan dari Serambinews pada Minggu (20/4/2025). Ia menegaskan pentingnya memandang masalah ini tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga dari perspektif pendidikan, nilai budaya, dan religiusitas yang melekat kuat dalam masyarakat Aceh.

Data dari Dinas Kesehatan Aceh menunjukkan, dalam dua dekade terakhir tercatat 1.735 kasus HIV di Aceh. Tren mengkhawatir-

kan terlihat pada 2025, di mana diperkirakan muncul 20 hingga 30 kasus baru setiap bulan. Sebagian besar penderita berada pada rentang usia 17 hingga 30 tahun—kelompok usia yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

“**Saya melihat ini sebagai alarm kemanusiaan dan sosial yang harus disikapi dengan serius dan menyeluruh.**”

**Anggota DPD RI,  
Darwati A Gani**

Darwati menekankan, peningkatan kasus ini bukan persoalan individu belaka, melainkan telah menjadi isu kesehatan masyarakat yang menuntut respons sistemik. Menurutnya, perlu penguatan layanan kesehatan, pendampingan psikososial, serta jejaring pemulihan dan terapi jangka panjang. “Jangan biarkan penderita merasa sendirian. Mereka butuh perlindungan dan harapan,” katanya.

Ia mengusulkan agar instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Syariat Islam

Aceh berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, dan komunitas lokal. “Langkah strategis harus menyatukan pendekatan medis, edukatif, dan moral. Kita butuh sistem integratif yang sensitif pada nilai-nilai masyarakat Aceh,” imbuhnya.

Darwati mengajak semua pihak bertindak sekarang, sebelum situasi menjadi lebih parah. Pendekatan holistik dan humanis, menurutnya, adalah kunci. “Dengan langkah bersama yang terukur, insyaallah kita bisa menjaga generasi muda dari ancaman HIV/AIDS, sekaligus menjunjung tinggi marwah syariat Islam dan nilai luhur masyarakat kita,” pungkasnya penuh harap. (\*)



**Anggota DPD RI Darwati A Gani**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Tamsil Linrung:

# Asta Cita Angkat DPD RI Jadi Aktor Substantif

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menegaskan peran strategis DPD RI dalam mengawal delapan pilar Asta Cita yang menjadi visi besar Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam seminar nasional di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (11/4/2025).

**Helena AF Ojan**

Penulis

**M**enurut Tamsil, Asta Cita telah mengangkat DPD RI dari institusi diskursif menjadi aktor substantif dalam desain ketatanegaraan. Ia menilai delapan pilar itu bukan semata visi politik pusat, tetapi juga representasi konkret dari aspirasi daerah yang selama ini terpinggirkan.

“DPD RI kini menjadi simpul vital penghubung antara kepentingan lokal dan kebijakan nasional. Melalui Asta Cita, DPD tidak sekadar menyuarakan aspirasi, tapi juga mengartikulasikannya dalam kebijakan strategis yang berdampak langsung ke daerah,” kata Tamsil.

Ia menyebut momentum



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung berbaur dengan mahasiswa peserta seminar di Universitas Hasanuddin, Makassar. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

transformasi DPD RI sejalan dengan arah baru pemerintahan Prabowo. Dalam konteks itu, Tamsil memperkenalkan gagasan dalam bukunya Paradigma Baru: Ijtihad Senator Menata Arsitektur Demokrasi, yang menjadi landasan pemikiran untuk mereposisi peran DPD RI dalam sistem demokrasi Indonesia.

Tamsil juga memaparkan sejumlah capaian DPD RI, seperti penurunan penyalahgunaan dana desa hingga 20 persen di 12 provinsi, serta keberhasilan mendorong empat rancangan undang-undang (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dua di antaranya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU

Masyarakat Hukum Adat. Kedua RUU ini dianggap sejalan dengan pilar keberlanjutan dan keadilan sosial dalam Asta Cita.

“DPD RI kini tidak lagi sayup di pinggiran meja kebijakan. Ia berdiri di tengah gelanggang, bersuara dalam bahasa kebangsaan yang utuh,” tegas Tamsil.

Ia menekankan, Asta Cita dan DPD RI harus menjadi solusi atas ketimpangan pembangunan antardaerah. Sebagai contoh, ia menyebut disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Papua (60,84) dan DKI Jakarta (80,77), yang menurutnya hanya bisa diatasi dengan pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah. (\*)

# Kunjungan Gubernur Tomsk ke DPD RI Diharapkan Jadi Titik Awal Kerja Sama



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas dan Yorrys Raweyai dan sejumlah senator bersama rombongan Gubernur Tomsk. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Theresia Oktavina**

Penulis

**G**ubernur Tomsk, Federasi Rusia, Vladimir Mazur, mengunjungi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (14/4/2025), guna menjajaki peluang kerja sama antardaerah. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, didampingi Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Yorrys Raweyai, pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), serta Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi.

Dalam pertemuan itu, Mazur menyampaikan harapannya agar pertemuan ini menjadi titik awal pembentukan kemitraan konkret, termasuk skema *sister province* dengan beberapa provinsi

di Indonesia, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Lampung.

Mazur menyebut potensi kerja sama meliputi riset teknik biomedis dengan Universitas Gadjah Mada, serta pengembangan bio-teknologi untuk pengolahan limbah kelapa sawit dan tambak udang bersama Jawa Timur. Universitas Tomsk sendiri telah menjalin kemitraan dengan ITS Surabaya dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia sebagai pintu masuk bagi perusahaan inovatif asal Tomsk. Saat ini, sekitar 60 mahasiswa Indonesia tengah menempuh pendidikan di Tomsk Polytechnic University, khususnya di bidang fisika dan nuklir, lewat kerja sama dengan BRIN.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyambut

positif inisiatif tersebut. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota yang siap menjadi mitra strategis Tomsk, terutama dalam kerangka kerja BRICS. “DPD RI siap memfasilitasi kemitraan langsung antara daerah di Indonesia dan luar negeri,” ujar Sultan.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menambahkan bahwa rencana kerja sama ini telah dikomunikasikan kepada Gubernur DIY, yang dinilai memiliki kesiapan sumber daya manusia unggulan dan lingkungan pendidikan yang mendukung.

Sejumlah senator turut mengusulkan daerah pemilihannya sebagai calon *sister province*, antara lain Darmansyah Husein dari Bangka Belitung dan Badikenita Putri Sitepu dari Sumatera Utara.

Menutup pertemuan, Sultan menegaskan bahwa seluruh potensi kerja sama dapat langsung ditindaklanjuti melalui kontak langsung antara mitra daerah dan institusi terkait, tanpa menunggu persetujuan pimpinan DPD RI. “Saya berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia, khususnya Provinsi Tomsk, makin erat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara,” pungkasnya. (\*)

# Senator Kecam Penambang Ilegal Rusak Hutan Pendidikan Unmul

Nanda Russia Rola

Penulis

**A**nggota Komite III DPD RI Aji Mirni Mawarni mengecam keras aktivitas tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur. Kawasan seluas 299 hektare tersebut telah ditetapkan sebagai area pendidikan dan konservasi sejak 1974.

“Ini bentuk perusakan terhadap ruang pendidikan yang seharusnya dijaga, bukan dieksploitasi untuk kepentingan jangka pendek,” tegas senator asal Kalimantan Timur itu dalam pernyataan persnya, Rabu (9/4/2025).

Aji Mirni menyebut peristiwa ini sebagai ironi, mengingat pemerintah

“**Ini bentuk perusakan terhadap ruang pendidikan yang seharusnya dijaga, bukan dieksploitasi untuk kepentingan jangka pendek.**”

**Anggota Komite III  
DPD RI,  
Aji Mirni Mawarni**

tengah mendorong peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui pendirian Sekolah Rakyat. Namun, di sisi lain, fasilitas pendidikan lingkungan seperti KHDTK justru tergerus oleh aktivitas ilegal yang merusak ekosistem dan menyebabkan

longsor.

Ia juga menyoroti lambannya penanganan dari aparat keamanan, meskipun pihak Fakultas Kehutanan Unmul telah melaporkan penyerobotan tersebut. “Penegakan hukum tegas penting dilakukan agar memberi efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa depan,” ujarnya.

Selain mendorong penegakan hukum, Aji Mirni menyatakan bahwa Komite III DPD RI tengah menyiapkan langkah advokasi atas kasus ini. Ia telah berkoordinasi dengan Ketua Komite III untuk membawa persoalan ini ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI agar ditindaklanjuti di tingkat nasional.

“Pelaku harus dihukum dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,” tegasnya. (\*)



Anggota Komite III DPD RI Aji Mirni Mawarni (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Kopdes Merah Putih Momentum Kebangkitan Ekonomi Rakyat



Anggota DPD RI Irman Gusman dalam pertemuan dengan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Forkopimda, Kepala Dinas Koperasi dan wali nagari. (Foto Tim Irman Gusman)

**Lela Sadiyah**

Penulis

**A**nggota DPD RI Irman Gusman menilai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai momentum penting bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Selama ini, menurutnya, desa lebih sering menjadi objek pembangunan, bukan subjeknya.

“Koperasi Merah Putih hadir untuk mengubah paradigma itu. Dengan koperasi sebagai ujung tombak, desa tidak hanya mendapat bantuan, tetapi juga bisa mandiri secara ekonomi,” kata Irman dalam pertemuan dengan Bupati dan Ketua

DPRD Kabupaten Solok, Forkopimda, Dinas Koperasi, dan para wali nagari, di Aula Kantor Bupati Solok, Kamis (10/5/2025).

Senator asal Sumatera Barat itu menyebut Inpres tersebut merupakan langkah konkret Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian desa dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dari akar rumput, khususnya di Sumatera Barat.

Irman juga menegaskan bahwa program Koperasi Merah Putih sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Artinya, koperasi ini mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat,”

ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden telah menginstruksikan 18 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam mendukung pembentukan koperasi ini. Karena itu, Irman mengajak seluruh kepala daerah di Sumbar segera menindaklanjuti Inpres tersebut hingga ke tingkat camat dan wali nagari.

“Koperasi Merah Putih juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Mulai dari penyediaan sembako murah, simpan pinjam, klinik, apotek, *cold storage*, hingga distribusi logistik yang disesuaikan dengan keunggulan dan kearifan lokal masing-masing daerah,” pungkasnya. (\*)

# Ini Alasan Alfiansyah Komeng Tetap dengan Gaya Kocaknya



Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami (dokumen DPD RI)

**Adhi Nugroho**

Penulis

**A**nggota DPD RI Alfiansyah Bustami, atau yang lebih dikenal sebagai Komeng, menjelaskan alasan di balik gayanya yang jenaka saat mengikuti sidang-sidang resmi di parlemen. Menurutnya, gaya kocak itu muncul secara alami dan bertujuan mencairkan suasana agar tidak membosankan.

“Niat saya biar nggak ngantuk. Kadang teman-teman juga suka, malah sering nyuruh saya nanya biar suasana jadi ramai,” ujar Komeng dalam podcast PWK bersama Gofar Hilman, dikutip Senin (14/4/2025).

Meski tampil menghibur, Komeng menegaskan tetap

“**Niat saya biar nggak ngantuk. Kadang teman-teman juga suka, malah sering nyuruh saya nanya biar suasana jadi ramai.**”

**Anggota DPD RI,  
Alfiansyah Bustami**

memegang teguh aturan sidang dan memahami tanggung jawabnya sebagai anggota Komite II DPD RI. Komite ini membidangi sektor strategis seperti pertanian, perhubungan, kelautan, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup.

“Saya nggak ada maksud macam-macam, cuma supaya penyampaian lapor-

an jadi lebih enak,” ujar Komeng. Ia juga menyebut sering berkolaborasi dengan sesama anggota asal Jawa Barat, termasuk Jihan Fahira, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya.

Komeng merupakan komedian kawakan yang sukses melenggang ke Senayan lewat Pemilu 2024 dengan perolehan suara terbanyak secara nasional, yakni 5.399.699 suara dari Dapil Jawa Barat. Gaya khasnya tetap melekat meski kini menjabat sebagai senator, bahkan saat membacakan laporan kerja di Sidang Paripurna DPD RI yang baru-baru ini viral di media sosial.

“Melawak itu naluri saya, susah dihilangkan. Tapi saya tetap serius dalam menjalankan tugas,” tutupnya. (\*)

# Hadapi Arus Globalisasi Budaya Harus Dipegang Teguh

Rini Sumarni

Penulis

**W**akil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mendorong penguatan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui dunia pendidikan. Hal ini disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Pendidikan Keistimewaan di Kantor DPD RI DIY, Kamis (10/4/2025), sebagai tindak lanjut dari FGD “Realisasi Pendidikan Keistimewaan DIY” yang digelar pada Januari lalu.

GKR Hemas menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta ke dalam sistem pendidikan formal maupun kehidupan sehari-hari. Ia menyebut Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 sebagai landasan utama dalam mewujudkan kebijakan pendidikan yang berakar pada nilai-nilai luhur dan budaya lokal.

“Penguatan karakter anak-anak kita tentang keistimewaan, nilai-nilai luhur, dan etika perlu menjadi perhatian bersama. Sekolah harus menjadi tempat menanamkan nilai-nilai tersebut secara implementatif,” ujar GKR Hemas.

Aktivis pendidikan dari Tamansiswa, Ki Darmaningtyas,



Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam Bimbingan Teknis Pendidikan Keistimewaan di DIY. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Penguatan karakter anak-anak kita tentang keistimewaan, nilai-nilai luhur, dan etika perlu menjadi perhatian bersama. Sekolah harus menjadi tempat menanamkan nilai-nilai tersebut secara implementatif.**”

**Wakil Ketua DPD RI,  
GKR Hemas**

turut menekankan bahwa pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan. “Kita terlalu fokus pada pendidikan formal, pada-

hal lingkungan dan keluarga punya peran besar dalam membentuk karakter anak,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY Suhirman menambahkan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2011 dan Perda Nomor 5 Tahun 2011 menjadi rujukan penting dalam menyusun kurikulum berbasis budaya lokal. Menurutnya, nilai-nilai budaya Yogyakarta harus terus ditanamkan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam membangun pendidikan berbasis budaya dan keistimewaan Yogyakarta. (\*)

# SIDRAP RUN 2025: Langkah Sehat Menuju Sidrap yang Maju

Fandi Tri Prayogo

Penulis

**M**inggu pagi di Sidrap terasa berbeda. Udara masih segar saat 5.000 pelari dari berbagai daerah bersiap di garis start, menantikan hitungan mundur Sidrap Run 2025. Bukan sekadar lomba lari, event ini menjadi simbol kebangkitan gaya hidup sehat sekaligus tonggak baru pembangunan wisata berbasis olahraga di Kabupaten Sidrap.

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung berdiri di antara kerumunan, mengenakan jaket olahraga dan topi hitam. Senyumnya lebar, semangatnya tak kalah dari para pelari yang akan segera melaju. “*Sport tourism* kini menjadi tren global yang terbukti mampu menggerakkan ekonomi. Ketika rakyat sehat, ekonomi ikut berlari kencang,” ucapnya lantang saat melepas peserta.

Tamsil melihat lebih dari sekadar keringat dan garis finis. Ia melihat Sidrap Run sebagai bentuk nyata dari pembangunan non-fisik: membangun kesadaran akan pentingnya hidup sehat,



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung saat melepas peserta Sidrap Run. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

sembari menggerakkan roda ekonomi masyarakat. UMKM lokal pun turut merasakan dampaknya. Warung kopi, penjaja makanan tradisional, hingga penginapan lokal ramai diserbu pengunjung sejak sehari sebelum lomba.

Apresiasi tinggi juga disampaikan kepada Bupati Sidrap Syahrudin Alrif. Bagi Tamsil, sosok bupati ini mampu melihat potensi luar biasa yang dimiliki daerahnya dari panorama alam yang menawan hingga kekayaan budaya yang khas. “Sidrap punya modal besar. Kalau dikelola profesional, bisa seperti Borobudur Marathon atau

Pocari Run,” katanya optimis.

Lebih dari itu, data WHO yang dikutip Tamsil menguatkan misi besar ini: aktivitas fisik rutin bisa menurunkan risiko penyakit hingga 30 persen. Dan Sidrap, dengan *event* ini, sedang melangkah menuju daerah yang lebih sehat, lebih produktif, dan tentu saja lebih dikenal dunia.

Sidrap Run bukan hanya tentang siapa tercepat mencapai garis akhir. Tapi tentang siapa yang mampu menginspirasi langkah perubahan. Dan pagi itu, Sidrap sudah memulainya. (\*)

# AMBON DARURAT NARKOBA: Alarm Kemanusiaan dari Timur Indonesia

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Di balik keindahan laut Maluku dan irama musik yang merdu dari tanah Ambon, tersimpan kegelisahan yang dalam. Di satu sudut kota, ganja diperdagangkan seperti kacang. Di sisi lain, rumah-rumah disulap menjadi tempat aman bagi para pengguna. Itulah gambaran kelam yang diungkap Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Maluku, Syarifah Lulu Assagaff, saat bertemu Anggota DPD RI asal Maluku, Bisri Ad Shiddiq Latuconsina.

“Di Kota Ambon, mereka berjualan seperti orang menjual kacang,” ujar Syarifah, menggambarkan betapa mudah dan terbukanya transaksi narkoba di sana. Tak hanya di Kuda Mati dan Bentas, Desa Batu Merah bahkan disebut sebagai “sarang narkoba” semua jenis tersedia. Dari ganja, sabu, hingga pil-pil haram lainnya.

Senator Bisri Latuconsina tampak tertegun. Bukan hanya karena data yang mengejutkan, tapi juga karena kompleksitas persoalan yang dihadapi. “BNN memang bukan mitra kerja Komite I, tetapi



Pertemuan Anggota DPD RI Bisri Ad Shiddiq Latuconsina dengan Koordinator Bidang P2M BNN Provinsi Maluku Syarifah Lulu Assagaff. (Foto Tim Bisri Ad Shiddiq Latuconsina)

“  
Di Kota Ambon,  
mereka berjualan  
seperti orang menjual  
kacang.”

Anggota DPD RI,  
Syarifah Lulu Assagaff

ini soal kemanusiaan. Soal masa depan generasi kita,” ucapnya serius. Dalam forum tersebut, Bisri juga membuka ruang agar BNN ikut memberi masukan dalam pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat dan revisi UU Desa.

Menurut Syarifah, jaringan narkoba di Ambon tak hanya bermain di darat. Di Desa Tulehu, jalur laut menjadi gerbang masuk barang haram ke kota. “Pangkalan *speedboat* di sana sering disewa para

bandar. Sopir-sopirnya rela mengantar karena bayaran besar,” katanya.

Lebih miris lagi, para bandar memanfaatkan celah paling rapuh: remaja lulusan SMA, pertemanan yang lugu, bahkan tukang ojek. Bahasa sandi pun mereka gunakan untuk mengelabui “paket mangga” yang dimaksud ternyata ganja.

Melawan narkoba bukan sekadar penegakan hukum, tapi kerja bersama yang harus dimulai dari desa, dari rumah, dari hati. Di Ambon hari ini, nyala perlawanan telah disuarakan. Tapi agar tak padam, ia butuh lebih dari sekadar data. Ia butuh keberanian dan tindakan nyata.

Sebab ketika narkoba dijual seperti kacang, maka setiap anak bangsa bisa jadi korban. (\*)

# Senator Lia Kutuk Dokter Pelaku Rudapaksa Keluarga Pasien RSHS

Arso P Nugrho

Penulis

**A**nggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama, mengutuk keras tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh seorang dokter residen anestesi, Priguna Anugerah, yang tengah mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Padjadjaran. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, ini telah menimbulkan kecaman luas dari berbagai pihak.

“Saya mengemukakan keras tindakan pelaku. Ini adalah tindakan biadab yang tidak hanya melukai korban, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap profesi dokter yang seharusnya melindungi dan merawat pasien serta keluarganya,” ujar Senator asal Jawa Timur ini dalam pernyataannya pada Sabtu (12/4/2025).

Ning Lia, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa peristiwa memilukan ini merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan etika profesi medis. Dia meminta agar pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga dikeluarkan dari lingkungan akademik dan profesi medis yang telah dice-



Priguna Anugerah (31), dokter residen anestesi dari Program (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang perkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). (Foto Antara)

mari oleh perbuatannya.

“Kejadian ini menjadi alarm keras bagi seluruh institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan untuk memperketat pengawasan dan proses seleksi terhadap calon tenaga medis. Saya juga meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas dalam menangani kasus ini. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual dalam bentuk apapun, terutama jika pelakunya berasal dari profesi yang seharusnya menjadi teladan masyarakat,” tegas Ning Lia.

Ning Lia juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawal kasus ini agar proses hukum berjalan dengan transparan dan adil. Dia berharap kejadian tragis ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan perempuan dan anak, baik

dalam aspek hukum maupun kebijakan kelembagaan. Selain itu, ia mendorong universitas dan rumah sakit terkait untuk memberikan pendampingan psikologis maksimal kepada korban dan keluarganya.

Kejadian yang mencoreng dunia kedokteran Indonesia ini, yang menjadi sorotan utama di berbagai media, diduga dilakukan oleh Priguna Anugerah, seorang dokter PPDS anestesi. Pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan berinisial FH (21) yang sedang menjaga ayahnya yang dirawat di RSHS Bandung.

Kasus ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia semakin diperkuat. (\*)

# Fahira Idris Kutuk Kekerasan Seksual oleh Dokter PPDS

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, mengutuk keras kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran terhadap anak pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Fahira menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya mencederai korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menodai institusi yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan.

“Sebagai tenaga medis yang seharusnya melindungi dan merawat, tindakan ini sungguh tak bisa diterima. Pelaku memanfaatkan posisinya untuk melakukan kejahatan yang memalukan,” ujar Fahira dalam rilis pers pada Minggu (13/4/2025). Ia menegaskan pentingnya penanganan kasus ini secara komprehensif, dengan pelaku dijatuhi hukuman maksimal.

Fahira menyoroti indikasi bahwa pelaku merupakan predator seksual yang bertindak secara sistematis dan berulang. Ia mendesak agar pelaku dijerat dengan pasal



Anggota DPD RI Fahira Idris

“**Sebagai tenaga medis yang seharusnya melindungi dan merawat, tindakan ini sungguh tak bisa diterima. Pelaku memanfaatkan posisinya untuk melakukan kejahatan yang memalukan.**”

Anggota DPD RI,  
Fahira Idris

berlapis berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan KUHP. “Pelaku harus dijatuhi hukuman paling berat sesuai dengan perbuatannya,” tambahnya.

Fahira juga menolak keras penerapan pendekatan *restorative justice* (RJ) dalam kasus

ini. Menurutnya, mediasi tidak tepat untuk kejahatan luar biasa, apalagi melibatkan anak-anak. “Keadilan bagi korban harus ditegakkan di pengadilan, bukan melalui mediasi yang dapat melecehkan rasa keadilan publik,” tegasnya.

Fahira menyerukan agar masyarakat bersama-sama mengawal proses hukum agar pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ia juga mendorong reformasi dalam sistem pendidikan dan rekrutmen profesi medis untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Proses hukum harus berjalan transparan dan tuntas. Reformasi dalam pendidikan dan rekrutmen profesi medis juga harus dilakukan untuk mencegah kasus serupa,” tutup Fahira. (\*)

# Haji Uma Temui Oknum TNI Pembunuh Sales Mobil di Aceh

Betria Eriani

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sudirman, atau yang akrab disapa Haji Uma, mengunjungi Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut (Denpomal) Lhokseumawe, Aceh, pada Jumat (11/4/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai proses hukum terhadap oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL) yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang sales mobil, Hasfiani, asal Aceh Utara. Haji Uma ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan adil.

Di Denpomal, Haji Uma disambut langsung oleh Komandan Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Lhokseumawe, Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu. Mereka kemudian bersama-sama menemui oknum TNI AL berinisial ID, yang saat itu tengah ditahan terkait kasus pembunuhan tersebut. Haji Uma melakukan wawancara langsung dengan ID untuk menggali lebih dalam mengenai motif dan latar belakang aksi kejahatan yang telah mengguncang masyarakat Aceh Utara.

Menurut Haji Uma, kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan pihak berwenang di Denpomal, serta untuk memeriksa sejauh mana proses hukum terhadap tersangka telah berjalan. "Kita ingin memastikan bahwa proses hukum ini berlangsung sesuai prosedur. Kami juga ingin mendengarkan penjelasan langsung dari pelaku mengenai apa yang terjadi," ujar Haji Uma setelah pertemuan.

Dalam interogasi dengan ID, Haji Uma menanyakan mengenai motif pembunuhan yang dilakukan oleh ID. Pelaku mengaku bahwa ia melakukan tindakan tersebut karena khilaf. ID juga menjelaskan alasan memilih mobil agen sebagai target perampokan, mengungkap-



Anggota DPD RI Sudirman atau Haji Uma saat berada di Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut (Denpomal) Lhokseumawe, Aceh. (Foto Tim Haji Uma)

kan bahwa mobil tersebut lebih mudah dicuri dibandingkan mobil rental yang biasanya dilengkapi dengan GPS. Aksi tersebut, menurut ID, berawal dari perkenalan melalui Facebook, yang kemudian berlanjut menjadi transaksi mobil yang berakhir tragis.

Pelaku juga menceritakan bahwa ia membawa senjata api untuk menjaga diri selama melakukan aksinya. Menariknya, ID menyebutkan bahwa senjata api tersebut diperolehnya secara pribadi dari Lampung, yang menjadi perhatian Haji Uma. "Ini menjadi catatan penting, karena peredaran senjata ilegal seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah," ujar Haji Uma, menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran senjata api di masyarakat.

Kepada Dandenspomal, Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu, Haji Uma menanyakan perkembangan lebih lanjut mengenai proses hukum terhadap tersangka. Menurut keterangan Dandenspomal, berkas perkara telah dilimpahkan ke Polisi Militer di Banda Aceh dan sedang ditangani oleh auditor militer. Selain itu, masih terbuka kemungkinan persidangan akan digelar di Lhokseumawe untuk memudahkan kehadiran saksi-saksi yang terlibat. Haji Uma mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan keadilan dapat ditegakkan. (\*)

## Demi Keadilan Fiskal Daerah:

# Senator Mirah Minta Pelabuhan Dikelola Pemda

M Fathoni

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyuarakan pentingnya penguatan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya serta akses fiskal yang lebih adil bagi pemerintah daerah. Dalam keterangannya pada Rabu (6/4/2025), Mirah menyoroti dua sektor strategis yang menjadi fokus, yaitu sektor perhubungan dan lingkungan hidup.

Mirah mengkritisi masih berlakunya kewenangan pengelolaan pelabuhan yang sepenuhnya di bawah otoritas pemerintah pusat. Padahal, pelabuhan merupakan titik vital lalu lintas barang dan orang yang berpotensi besar memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah. “Sayang sekali jika aktivitas pelabuhan yang ramai, tetapi hasilnya tidak dapat dirasakan oleh daerah. Ini soal keadilan fiskal dan optimalisasi aset lokal,” tegasnya. Dia berpendapat bahwa jika pengelolaan pelabuhan diserahkan kepada pemerintah daerah, potensi pendapatan asli daerah (PAD)

dapat meningkat signifikan.

Lebih lanjut, Mirah menjelaskan bahwa pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai upaya administratif, termasuk penyusunan dokumen dan pengajuan yang diperlukan untuk mengambil alih pengelolaan pelabuhan tersebut. Namun, hingga kini kewenangannya belum juga diserahkan. Oleh karena itu, Mirah mendesak agar pemerintah pusat merespons permintaan ini dengan serius untuk mewujudkan ke-  
mandirian fiskal daerah.

Selain sektor perhubungan, Mirah juga menyoroti skema penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penggunaan kawasan hutan, yang saat ini seluruh pembayarannya langsung masuk ke kas negara tanpa ada pembagian ke daerah, meskipun kawasan hutan tersebut berada dalam wilayah pemerintah daerah. “Ketika daerah ingin melakukan konservasi atau penguatan sistem kehutanan, kita terbentur pada ketiadaan anggaran, padahal ada PN-

BP-PKH yang bisa menjadi sumber dana bagi daerah,” ungkapnya.

Mirah mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan skema bagi hasil dari PNBP-PKH untuk daerah, mirip dengan dana bagi hasil (DBH) sektor lain. Dengan adanya pembagian yang adil, diharapkan daerah dapat memperoleh manfaat langsung dari sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

“Kita sudah saatnya berbicara tentang pembagian yang lebih adil. Jika sumber daya alam berada di daerah, maka wajar jika daerah juga memperoleh manfaat langsung dari penggunaannya,” pungkask Senator Mirah Fahmid, menutup pembicaraannya. (\*)



Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid (Foto Biro PHM DPD RI)

# Pengentasan Kemiskinan Desa Abraham Belajar ke China

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Paul Liyanto, baru-baru ini mengunjungi sejumlah desa di Provinsi Jiangxi, China, untuk bertukar pandangan mengenai pengentasan kemiskinan dan revitalisasi pedesaan. Salah satu desa yang dikunjungi adalah Desa Shenshan di Jingtangshan, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu daerah miskin di China namun kini telah berhasil keluar dari daftar kemiskinan.

Jingtangshan masuk dalam gelombang pertama wilayah yang terbebas dari kemiskinan pada Februari 2017. Sejak saat itu, perekonomian kawasan ini berkembang pesat, dengan nilai pendapatan per kapita yang dapat dibelanjakan meningkat signifikan dari 9.606 yuan (setara Rp22 juta) pada 2017, menjadi 18.436 yuan (sekitar Rp42 juta) pada 2025. Perubahan ekonomi ini dipandang sebagai bukti keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan.

Kondisi Desa Shenshan sendiri, yang sebelumnya sulit dijangkau karena akses jalan yang rusak, kini telah mengalami transformasi besar. “Sebelum pengentasan kemiskinan, kami hanya dapat menyusuri jalur lumpur yang berliku-liku dan menempati rumah yang terbuat dari tanah dan batu,” ungkap Kepala Desa Shenshan, Peng Zhanyang. Kini, jalan beraspal memisahkan jalur mobil dan pejalan kaki, dengan fasilitas umum seperti lapangan parkir, pabrik pengolahan air limbah, dan toilet umum yang bersih untuk warga serta wisatawan.

Abraham Paul Liyanto juga mengunjungi pabrik bambu di Desa Mayuan, dekat Desa Shenshan, yang memproduksi berbagai barang dari bambu seperti tas, mebel, dan mainan. Di sini, Abraham menyaksikan proses



Anggota DPD RI Abraham Paul Liyanto sedang berada di Jingtangshan, Provinsi Jiangxi, China. (Foto Antara)

produksi secara langsung dan menemukan sistem manajemen yang terintegrasi dengan pemantauan produksi secara real-time melalui komputer. Selain itu, ia juga mengunjungi rumah Zuo Chunren, seorang petani yang kini meraih pendapatan sekitar 100 ribu yuan per tahun, berkat dukungan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Dari kunjungannya, Abraham menyimpulkan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan di desa-desa tersebut tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang mencakup infrastruktur yang kuat, keterlibatan perusahaan dalam pengembangan industri kebudayaan dan pariwisata, serta pendidikan dan pelatihan yang tepat. “Ini merupakan pelajaran penting bagi Indonesia, dengan pendekatan yang terintegrasi namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah,” kata Abraham.

Menurutnya, strategi yang diterapkan oleh pemerintah setempat di China bisa menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mempercepat pembangunan di daerah pedesaan. “Poin-poin penting ini bisa menjadi pedoman bagi kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan,” pungkas Abraham. (\*)

# Senator Yashinta Beri Resep Cegah Pinjol di Gunungkidul

Fandi Tri Prayogo

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), RA Yashinta Sekarwangi Mega, mengadakan kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (15/4/2025). Salah satu isu yang disorot dalam acara ini adalah keresahan masyarakat mengenai maraknya pinjaman *online* (pinjol) dan judi *online* (judol) di kalangan anak muda. Masalah ini, menurut Yashinta, menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan masyarakat.

Menanggapi keluhan masyarakat, Yashinta menekankan pentingnya sosialisasi literasi keuangan sebagai langkah pencegahan terhadap pinjaman *online* ilegal. Dia mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan di DIY menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka pinjol ilegal yang banyak menjerat masyarakat, terutama anak muda. "Sosialisasi literasi keuangan menjadi hal yang krusial untuk mencegah praktik pinjol ilegal yang merugikan banyak pihak," ujar Yashinta.

Sebagai solusi, Yashinta mengusulkan metode 'gethok tular' atau dari mulut ke mulut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan. Metode ini, yang merupakan bagian dari budaya Nusantara, diharapkan dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan keuangan kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. "Dengan menggunakan metode gethok tular, saya percaya literasi keuangan bisa lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat," tambah Yashinta.

Selain itu, Yashinta berkomitmen untuk bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turun langsung ke lapangan guna memberikan pelatihan literasi keuangan



Anggota DPD RI RA Yashinta Sekarwangi Mega bersama Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih. (Foto Istimewa)

kepada masyarakat. Para peserta pelatihan juga akan diberikan tugas untuk menyampaikan informasi keuangan kepada orang lain dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, arisan, dan pos kamling, dengan harapan dapat menciptakan efek domino dalam penyebaran informasi yang bermanfaat.

Acara Jaring Aspirasi Masyarakat tersebut juga dihadiri oleh Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, yang turut mendukung upaya Yashinta dalam menangani permasalahan pinjol dan meningkatkan literasi keuangan di daerah tersebut. Selain itu, kegiatan ini dirangkai dengan aksi kemanusiaan berupa pembagian kacamata gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Indonesia Melihat Nusantara, Karang Taruna Kabupaten Gunungkidul, serta mitra strategis seperti Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN) Pengda DIY, Akademi Optometri Yogyakarta (AKTRIYO), Poltekkes Ummi Khasanah Bandung, dan STIKes Dharma Husada Bandung. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Gunungkidul tidak hanya mendapat manfaat secara langsung, tetapi juga dapat mengatasi masalah pinjol dan judol melalui peningkatan literasi keuangan yang lebih efektif. (\*)

# Azhari Cage Salurkan Bantuan untuk Petani Terdampak Banjir



Anggota DPD RI Azhari Cage mengerahkan bantuan buat masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. (Foto Istimewa)

**Helena AF Ojan**

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Azhari Cage, melakukan aksi nyata dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada Minggu (13/4/2025). Banjir yang melanda kawasan persawahan di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir telah mengakibatkan kerusakan parah pada ratusan hektare lahan pertanian, memicu kecemasan petani akan ancaman gagal panen. Menyikapi bencana ini, Azhari Cage turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan bantuan dan mendengarkan langsung keluhan warga setempat.

Saat berada di lokasi, Azhari Cage menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Ia menyampaikan komitmennya untuk mendorong kementerian terkait

agar segera melakukan normalisasi Sungai Krueng Ajo dan pengerukan di kawasan Kuala Bungkah guna mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda. Bagi Azhari, penyelesaian masalah jangka panjang sangat penting untuk mencegah bencana serupa di masa depan.

Selain fokus pada perbaikan infrastruktur pengendalian banjir, Azhari Cage juga menegaskan pentingnya bantuan langsung untuk petani yang mengalami kerugian akibat banjir. Salah satunya adalah penyaluran bantuan bibit padi untuk para petani yang kehilangan tanaman mereka. “Kami akan mendorong pemerintah daerah agar segera menyalurkan bantuan bibit padi kepada petani yang terdampak agar mereka bisa segera melakukan penanaman kembali,” ujar Azhari.

Langkah cepat yang diambil Azhari Cage mendapat apresiasi tinggi dari Camat Muara Batu, Munawir. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang

mendalam atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Azhari kepada warga setempat. “Banjir ini sangat berdampak pada warga kami, terutama para petani. Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang disalurkan, dan semoga ini bisa meringankan beban masyarakat,” ungkap Munawir.

Sebanyak 400 paket bantuan telah disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir, yang terdiri dari bantuan sembako dan kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini merupakan hasil kerjasama antara Azhari Cage dan Kementerian Sosial (Kemensos). Kepala Dinas Sosial Aceh Utara, Iskandar, mengungkapkan bahwa bantuan tersebut diberikan berdasarkan laporan yang diterima oleh kementerian dan upaya yang dilakukan oleh Azhari Cage untuk meringankan beban warga.

Melalui bantuan ini, diharapkan masyarakat yang terdampak dapat merasakan manfaatnya, serta menjadi langkah awal untuk penanganan yang lebih serius terhadap bencana tahunan yang sering melanda wilayah Aceh Utara. Azhari Cage menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya para petani yang menjadi sektor vital bagi perekonomian daerah tersebut. (\*)

# Kunjungan Reses ke Dapil Elviana Bawa “Oleh-oleh”

Lela Sadiyah

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jambi, Elviana, melaksanakan kegiatan reses di Dusun Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, pada Jumat (11/4/2025). Dalam kunjungan tersebut, Elviana memberikan obat-obatan gratis kepada masyarakat setempat sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan kesehatan warga di daerah tersebut. Obat-obatan yang dibagikan mencakup berbagai jenis, mulai dari vitamin hingga obat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti parasetamol dan oralit.

Elviana mengatakan bahwa pembagian obat-obatan tersebut merupakan bagian dari program resesnya sebagai senator. “Alhamdulillah, hari ini adalah penutupan masa reses awal tahun 2025. Saya berkunjung ke Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas dan membawa oleh-oleh untuk masyarakat berupa obat-obatan dari Kementerian Kesehatan,” ujar Elviana saat ditemui wartawan. Pembagian obat-obatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakses kebutuhan medis dasar tanpa harus jauh-jauh pergi ke rumah sakit.

Selain membagikan obat,



Anggota DPD RI Elviana saat melakukan kunjungan reses ke Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Jambi. (Foto Istimewa)

Elviana juga meminta kepada Kepala Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas agar obat-obatan tersebut bisa disalurkan ke puskesmas pembantu di wilayah sekitar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah-daerah terpencil, dapat merasakan manfaat dari bantuan tersebut. “Saya berharap puskesmas di sini bisa memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, agar masyarakat tidak terlalu tergantung pada RSUD H. Hanafie di Bungo,” tambah Elviana.

Elviana juga mengungkapkan harapannya agar fasilitas kesehatan di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas bisa terus ditingkatkan. Mengingat lokasi puskesmas yang strategis, berada di pinggir jalan lintas Sumatera, Elviana berharap agar puskesmas ini bisa diubah statusnya menjadi rumah sakit. “Saya juga meminta kepada Bupati Bungo yang baru untuk mempertimbangkan meningkatkan status Puskesmas Tanah

Sepenggal Lintas menjadi rumah sakit agar pelayanan kesehatan lebih maksimal,” ungkap Elviana.

Camat Tanah Sepenggal Lintas, Sulaiman, menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Elviana atas perhatian dan dukungannya terhadap peningkatan fasilitas kesehatan di wilayahnya. “Kami sangat berterima kasih karena Ibu Elviana telah melaksanakan reses di sini. Puskesmas ini sangat membutuhkan pembangunan, terutama karena posisinya yang strategis di jalan lintas Sumatera. Kami sangat berharap ada tambahan pembangunan gedung,” ujar Sulaiman.

Kegiatan reses ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat yang merasa terbantu dengan bantuan obat-obatan yang diberikan. Melalui kegiatan reses tersebut, Elviana menunjukkan komitmennya untuk memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah pemilihannya dan mendorong perbaikan fasilitas kesehatan yang lebih baik. (\*)

# Pemerintah Perlu Intervensi untuk Dongkrak Kesejahteraan Nelayan



Kapal para nelayan sedang sandar di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. (Foto CNBC Indonesia)

**Nanda Russia Rola**

Penulis

**P**ada momentum Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, mengingatkan pentingnya intervensi strategis oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurut Fahira, nelayan merupakan salah satu pahlawan ketahanan pangan nasional, dan peran mereka sangat strategis dalam menjaga pasokan pangan laut bagi Indonesia. Oleh karena itu, intervensi yang bersifat struktural dan menyentuh akar persoalan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa nelayan kecil mendapatkan perhatian yang layak.

Fahira menyampaikan lima intervensi strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan. Pertama, reformasi akses permodalan dan asuransi bagi nelayan. Banyak nelayan

kecil yang tidak memiliki dokumen legal atau jaminan aset yang dibutuhkan untuk mengakses layanan perbankan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mempermudah akses mereka terhadap pembiayaan yang bisa membantu usaha mereka.

Kedua, Fahira menekankan pentingnya modernisasi teknologi tangkap dan digitalisasi informasi. Nelayan tradisional masih mengandalkan teknik penangkapan ikan yang kurang efisien dan ramah lingkungan. Untuk itu, pemerintah perlu mendistribusikan alat tangkap yang lebih modern, seperti bubu lipat atau alat tangkap berbasis sensor, yang tidak hanya efisien tetapi juga lebih ramah lingkungan.

Ketiga, revitalisasi tata niaga dan sistem logistik perikanan juga menjadi fokus penting. Ketimpangan dalam rantai distribusi hasil tangkapan ikan menyebabkan nelayan kecil tidak mendapatkan harga yang layak. Fahira mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maritim atau

Badan Layanan Umum (BLU) yang bisa membeli hasil tangkapan nelayan langsung dari mereka dengan harga yang wajar, sehingga nelayan mendapatkan harga yang adil untuk hasil kerja keras mereka.

Keempat, penegakan kedaulatan laut dan perlindungan terhadap wilayah tangkap tradisional nelayan kecil juga sangat penting. Saat ini, banyak nelayan kecil yang kehilangan akses ke wilayah tangkap mereka akibat ekspansi industri dan kapal asing. Oleh karena itu, Fahira mendesak pemerintah untuk memperkuat pengawasan laut dengan patroli terpadu antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) untuk melindungi hak-hak nelayan lokal.

Terakhir, Fahira menyoroti pentingnya pendidikan, regenerasi, dan transformasi profesi nelayan. Banyak generasi muda yang enggan mengikuti jejak orang tua mereka untuk menjadi nelayan. Oleh karena itu, perlu ada program yang mendorong generasi muda untuk kembali ke laut dan menjadi nelayan, serta mendapatkan pendidikan yang memadai tentang kelautan dan perikanan agar profesi ini tetap relevan dan berkelanjutan di masa depan.

Dengan berbagai intervensi strategis ini, Fahira berharap kesejahteraan nelayan bisa meningkat, dan ketahanan pangan Indonesia dapat lebih optimal. (\*)

# Senator Jelita Donal Pantau Persiapan Haji di Sumbar

Adhi Nugroho

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jelita Donal, melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Barat pada Kamis (10/4/2025) untuk memantau proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin, serta Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Lila Yanwar. Dalam pertemuan tersebut, Mahyudin memberikan paparan mengenai kemajuan persiapan ibadah haji di Sumbar.

Mahyudin menjelaskan bahwa pihaknya sedang dalam tahap penyusunan pramainfest untuk pengurusan visa bagi jemaah haji. Untuk tahun 2025, Kanwil Kemenag Sumbar telah mengajukan permohonan visa untuk 14 kloter dari 15 kloter jemaah haji Embarkasi Padang. “Alhamdulillah, 93,33 persen dokumen jemaah haji Sumbar sudah diusulkan untuk pemvisaan melalui aplikasi Siskohat Kemenag,” ujar Mahyudin. Ia menambahkan, satu kloter sisanya masih dalam proses pelunasan yang dijadwalkan selesai pada 17 April mendatang.

Keberhasilan ini, menurut



Anggota DPD RI Jelita Donal bersama Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Mahyudin. (Foto Kanwil Kemenag Sumbar)

Mahyudin, menunjukkan komitmen Kanwil Kemenag Sumbar dalam mempercepat proses administrasi haji. “Sumbar termasuk salah satu provinsi yang cepat dalam mengusulkan permohonan dokumen pemvisaan jemaah haji. Bahkan sempat berada di urutan teratas, meskipun saat ini berada di posisi tiga, kami masih unggul dalam persentase pencapaian secara nasional,” kata Mahyudin.

Jelita Donal, yang lebih dikenal dengan sapaan Ustaz Jel Fatullah, mengapresiasi pencapaian tersebut. Ia menyatakan, “Ini adalah hasil kerja keras tim Kanwil Kemenag Sumbar yang patut diapresiasi. Saya sangat mendukung upaya ini, karena sesuai dengan arahan Presiden RI dan Menteri Agama untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji

2025.” Ia juga menambahkan bahwa pemerintah terus berusaha menekan biaya penyelenggaraan haji demi meringankan beban jemaah.

Kunjungan Jelita Donal menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh persiapan haji berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Selain itu, ia juga berharap proses administrasi lainnya dapat selesai tepat waktu sehingga jemaah haji Sumbar dapat melaksanakan ibadah haji dengan nyaman dan khusyuk.

Secara keseluruhan, Kunjungan Jelita Donal ke Kanwil Kemenag Sumbar menunjukkan perhatian yang serius terhadap kelancaran ibadah haji tahun ini, serta dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi jemaah haji. (\*)

# Senator Graal Bersama Wartawan Bincang Santai Tentang DPD RI

M. Fathoni

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Maluku Utara, Graal Taliawo, menggelar tatap muka dengan sejumlah wartawan di Kota Ternate pada Sabtu (12/4/2025) dalam acara bertajuk 'Bincang Santai Tentang DPD RI'. Dalam pertemuan tersebut, Graal mengajak para wartawan untuk secara bersama-sama mengawal aspirasi masyarakat Maluku Utara, terutama dalam menangani berbagai permasalahan yang ada, seperti isu pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan transportasi.

Menurut Graal, ada beberapa isu penting yang harus menjadi perhatian serius, terutama mengenai pembangunan infrastruktur di kawasan daerah Terluar, Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan (3TP). "Pembangunan infrastruktur di kawasan 3TP harus dibangun untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari," ujarnya. Graal menambahkan bahwa kawasan 3TP di Provinsi Maluku Utara membutuhkan perhatian khusus, karena daerah tersebut sulit dijangkau dan memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.



Anggota DPD RI Graal Taliawo saat melakukan tatap muka dengan sejumlah wartawan di Kota Ternate. (Foto Istimewa)

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan 3TP, DPD RI sedang mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan segera disahkan. Jika RUU ini disetujui, Graal yakin bahwa progres pembangunan di kawasan 3TP akan lebih cepat, apalagi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang berada di wilayah Indonesia Timur.

Graal juga menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, yang selama ini tidak memiliki infrastruktur dermaga pelabuhan. Ia mengenang saat masyarakat setempat menjemputnya menggunakan perahu untuk menuju ke wilayah tersebut karena tidak ada dermaga yang memadai. Selain itu, Graal juga mengungkapkan

keluhan masyarakat di Pulau Makian yang telah meminta kepada pemerintah untuk segera membangun dermaga pelabuhan di wilayah mereka. "Warga setempat saat bepergian ke Kota Ternate harus basah kuyup saat naik maupun turun dari kapal cepat, terutama saat cuaca buruk, karena ketiadaan dermaga pelabuhan," ungkap Graal.

Graal berharap, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, pembangunan infrastruktur, terutama dermaga pelabuhan, dapat segera terealisasi dan mempermudah aksesibilitas masyarakat di wilayah 3TP. Dalam kesempatan tersebut, Graal juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, DPD RI, dan media untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan daerah. (\*)

# Sultan Minta Segera Diatasi Pendangkalan Pelabuhan Baai



Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang mengalami pendangkalan. (Foto Istimewa)

**Theresia Oktavina**

Penulis

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, mendesak pemerintah Provinsi Bengkulu, PT Pelindo II, dan pihak terkait lainnya untuk segera melakukan pengerukan di Pelabuhan Pulau Baai yang telah mencapai level darurat akibat sedimentasi. Pendangkalan pelabuhan tersebut sangat berisiko bagi armada kapal dan mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi serta sosial di daerah tersebut.

“Pelabuhan Pulau Baai merupakan hub perdagangan Bengkulu dan kawasan barat Pulau Sumatera. Keberadaan pelabuhan ini sangat strategis, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial masyarakat. Oleh karena itu, proses pengerukan sedimentasi pelabuhan harus dilakukan dengan intensitas tinggi dan skala penuh oleh pihak terkait,” tegas Sultan dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

“Pelabuhan Pulau Baai merupakan hub perdagangan Bengkulu dan kawasan barat Pulau Sumatera. Keberadaan pelabuhan ini sangat strategis, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial masyarakat. Oleh karena itu, proses pengerukan sedimentasi pelabuhan harus dilakukan dengan intensitas tinggi dan skala penuh oleh pihak terkait.”

**Ketua DPD RI,  
Sultan B Najamudin**

Untuk mempercepat pemulihan aktivitas pelabuhan utama di Bengkulu, Sultan menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. “Jika

diperlukan, Pemerintah Daerah Bengkulu sementara waktu perlu menyiapkan transportasi dan pengangkutan alternatif guna mendistribusikan kebutuhan sembako bagi masyarakat di Kepulauan Enggano,” tambahnya.

Sultan, yang juga mantan Wakil Gubernur Bengkulu, mengapresiasi upaya pemerintah dan PT Pelindo II yang sudah bekerja keras dalam menangani kedaruratan pelabuhan tersebut. Namun, dia mengajak semua pihak untuk terus mendukung dan mengawal proses pengerukan yang sedang dilaksanakan oleh Pelindo II.

Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai telah terjadi sejak beberapa waktu lalu, dengan dampak signifikan pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bengkulu. Kapal milik Pertamina yang tak bisa bersandar menyebabkan distribusi BBM dilakukan melalui jalur darat, yang mengakibatkan kerugian operasional bagi Pertamina.

Selain itu, pendangkalan juga berdampak pada kehidupan sekitar 4.000 warga Pulau Enggano. Selama dua minggu, kapal transportasi tidak bisa beroperasi, menyebabkan warga terisolasi dan hasil pertanian seperti pisang serta ikan tidak bisa dipasarkan. Ekspor sejumlah komoditas seperti cangkang sawit, CPO, dan batu bara juga terhenti akibat kondisi tersebut. (\*)

# Perkuat Sinergi DPD RI dan Daerah, Senator Badikenita Kunjungi Nias

Arso P Nugroho

Penulis

Untuk memperkuat sinergi antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan pemerintah daerah, Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias, Sumatera Utara, pada Rabu (9/4/2025). Dalam kunjungan ini, Badikenita disambut langsung oleh Bupati Nias, Yaatulo Gulo.

Kunjungan Badikenita kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi daerah, khususnya yang berada di bawah bidang Komite II DPD RI, yaitu pertanian, perhubungan, kelautan perikanan, energi, sumber daya mineral, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, pekerjaan umum, serta BUMN.

Badikenita mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Nias dalam memajukan daerah tersebut. Ia juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Nias, dengan mendorong semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk berkontribusi dalam menghadapi isu-isu strategis yang ada di daerah tersebut. "Potensi Kabupaten Nias sangat besar, kita harus bersama-sama mengembangkan dan



Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias. (Foto Pemkab Nias)

“Potensi Kabupaten Nias sangat besar, kita harus bersama-sama mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemajuan daerah.”

**Ketua Komite II DPD RI,  
Badikenita Br. Sitepu**

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Badikenita meminta pemerintah daerah untuk segera menyiapkan data prioritas pembangunan yang akan dibahas dalam rapat di tingkat nasional. Selain itu, ia juga memberikan perhatian khusus pada produk UMKM di Kabupaten Nias, dengan menyarankan agar

produk-produk tersebut terdaftar untuk membantu promosi dan memperluas jangkauan pasar. Badikenita juga berpesan agar kualitas hasil pertanian dan perkebunan di Nias tetap terjaga agar dapat memiliki daya saing yang tinggi dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Nias, Yaatulo Gulo, dalam paparannya menyampaikan bahwa prioritas pembangunan daerah akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengembangan UMKM juga akan menjadi salah satu strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nias. (\*)

# Bupati Nias Selatan Sampaikan Keluhan Masyarakat ke Senator



Anggota DPD RI Penrad Siagian melakukan pertemuan dengan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan. (Foto Istimewa)

**Betria Eriani**

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Selatan pada Selasa (8/4/2025). Kunjungan senator asal Sumatera Utara itu disambut hangat oleh Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, dan keduanya mengadakan pertemuan di ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Nias Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sokhiatulo Laia menyampaikan ucapan terima kasih atas berbagai program yang telah dijalankan oleh anggota DPD RI, khususnya untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan. Ia berharap agar program-program tersebut dapat memberikan

dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

Bupati Laia juga menyampaikan sejumlah masalah dan keluhan yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut, antara lain terkait tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan hutan di Kepulauan Batu, pemindahan tugas Guru Garis Depan (GGD) yang penempatannya ada di Kabupaten Nias Selatan, serta permohonan beasiswa bagi putra-putri Kabupaten Nias Selatan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3.

Selain itu, Bupati Laia juga mengungkapkan tantangan dalam pengadaan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Nias Selatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mengingat terbatasnya dana yang ada di

APBD. Ia juga mengusulkan pengadaan peralatan medis dan peremajaan kapal ASDP yang melayani rute Teluk Dalam – Pulau Tello, mengingat kondisi kapal yang ada saat ini sudah sangat tua. “Kami berharap agar anggota DPD RI dapat memfasilitasi pertemuan dengan kementerian terkait,” ujar Bupati Laia.

Menanggapi keluhan tersebut, Penrad Siagian memaparkan beberapa program kerja yang tengah dijalankan di Kabupaten Nias Selatan dan memohon dukungan dari pemerintah daerah agar program-program tersebut dapat berjalan sukses. Penrad juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk segera menyurati kementerian terkait agar pertemuan dapat diadakan guna membahas solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi daerah tersebut.

Di akhir pertemuan, Penrad Siagian menyerahkan plakat sebagai simbol penghargaan kepada Pemkab Nias Selatan, yang diterima langsung oleh Bupati Sokhiatulo Laia. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Nias Selatan Ikhtiar Duha, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, dan Kabag di lingkungan Setda Kabupaten Nias Selatan. (\*)

# SIKAPI KEBIJAKAN IMPOR AS: DPD RI MINTA PEMERINTAH SIAPKAN LANGKAH KONKRET

Theresia Oktavina

Penulis

**S**idang Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (15/4/2025), menyoroti perang tarif yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan Trump itu dinilai merupakan salah satu kebijakan ekonomi paling kontroversial dalam sejarah perdagangan global.

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin saat memimpin sidang menyebut perang tarif ini telah menciptakan gelombang ketidakpastian di seluruh dunia serta meningkatkan risiko resesi global, sehingga memiliki dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia. Meski Indonesia bukanlah pihak langsung dalam konflik ini, namun sebagai negara yang terintegrasi dalam rantai pasokan global, dampaknya akan terasa di berbagai sektor, seperti potensi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 sampai 0,5 persen.

Sehubungan dengan hal itu, harus ada langkah konkret untuk menyikapi kebijakan Amerika Serikat tersebut. “Memang masih terdapat jeda 90 hari sebelum penerap-



Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin saat memimpin Sidang Paripurna ke-12 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

an tarif itu dilaksanakan. Namun kebijakan perang tarif ini akan memiliki potensi dampak seperti penurunan ekspor, fluktuasi harga komoditas, krisis daya saing industri manufaktur, serta pengaruh terhadap pasar modal dan pariwisata,” kata Sultan.

Sultan mengungkapkan, Pimpinan DPD RI sudah melakukan diskusi terkait dengan langkah awal yang perlu diambil pemerintah, antara lain mempercepat reformasi struktural melalui deregulasi dan insentif fiskal untuk menarik investasi asing dan domestik, meningkatkan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan terutama pada pasar AS, dan optimalkan kerja sama regional, khususnya dalam kerangka ASEAN, untuk

memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.

Sultan menambahkan, bahwa pemerintah perlu melakukan penguatan kebijakan perlindungan industri lokal, menerapkan regulasi ketat untuk mengawasi barang-barang impor, terutama produk-produk yang bersaing langsung dengan industri lokal. Hal ini bertujuan untuk melindungi produsen domestik dari persaingan tidak sehat.

“Tentunya hal ini perlu penyesuaian dengan wacana pemerintah untuk membuka keran impor. Walaupun pembukaan keran impor bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga pasokan komoditas, tetapi jangan sampai berdampak negatif pada perekonomian domestik,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. (\*)

# Senator Beberkan Isu Krusial di Daerah

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaporkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat daerah dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI, Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (15/4/2025). Laporan tersebut merupakan isu-isu prioritas atau krusial yang mereka temukan di daerah selama masa reses.

Berbeda dengan penyampaian laporan hasil reses sebelumnya yang disampaikan oleh perwakilan senator per daerah pemilihan (dapil), kali ini laporan disampaikan oleh perwakilan sub wilayah. Untuk perwakilan Sub Wilayah Barat I disampaikan oleh Leni Haryati John Latief (Bengkulu), Sub Wilayah Barat II oleh Kondang Kusumaning Ayu (Jawa Timur), Sub Wilayah Timur I oleh Al Hidayat Samsu (Sulawesi Selatan), dan Sub Wilayah Timur II oleh Sopater Sam (Papua Pegunungan).

“Laporan reses oleh perwakilan sub wilayah menjadi lebih singkat dan alat kelengkapan dapat lebih fokus untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang bersifat nasional. Sementara aspirasi masyarakat yang bersifat regional atau kedaerahan akan ditindaklanjuti oleh sub wilayah,” ucap Ketua DPD



Suasana Sidang Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (15/4/2025). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Laporan reses oleh perwakilan sub wilayah menjadi lebih singkat dan alat kelengkapan dapat lebih fokus untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang bersifat nasional. Sementara aspirasi masyarakat yang bersifat regional atau kedaerahan akan ditindaklanjuti oleh sub wilayah.**”

**Ketua DPD RI,  
Sultan B. Najamudin**

RI Sultan B. Najamudin saat memimpin sidang.

Laporan yang disampaikan perwakilan masing-masing sub wilayah itu mencakup semua tugas dan fungsi alat kelengkapan DPD RI. Untuk Komite I difokuskan pada pengawasan

atas implementasi UU Desa, pengelolaan dana desa, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Komite II menyoroti masalah lingkungan hidup, energi, serta infrastruktur kelautan.

Sementara itu, Komite III menyoroti percepatan transformasi layanan kesehatan dan pendidikan keagamaan, serta pengawasan atas Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kepe-mudaan. Komite IV menyoroti masalah keuangan dan perbankan, khususnya peran OJK dan Bank Indonesia sebagai aktor utama dalam pengawasan pinjaman digital atau pinjaman *online* (pinjol).

Sedangkan dalam ruang lingkup kerja Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), fokus diarahkan pada penataan ruang dan pengelolaan sampah, serta penyederhanaan dan digitalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (\*)

# Rekomendasi Hasil Reses, Senator Perkuat Pengawasan Dana Desa

Nanda Russia Rola

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Leni Haryati John Latief, mewakili Sub Wilayah Barat I, menyampaikan rekomendasi yang dihimpun dari hasil reses dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI, Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (15/4/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, didampingi para Wakil Ketua, yakni GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai.

“Untuk lingkup Komite I, perlu diperkuat pengawasan atas implementasi UU Desa dan dana desa. DPD RI perlu mendorong reformasi pengawasan yang lebih partisipatif dan transparan terhadap pengelolaan dana desa, mengingat tingginya kasus penyimpangan serta lemahnya kapasitas pengelola BUMDes,” kata senator asal Bengkulu itu.

Terkait isu prioritas Komite III, Sub Wilayah Barat I mendukung percepatan transformasi layanan kesehatan dan pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan anggaran dan kapasitas layanan kesehatan di daerah, terutama pascabencana dan bagi kelompok rentan. Ia



Pimpinan dan anggota DPD RI berfoto berbersama usai Sidang Paripurna ke-12 DPD RI, Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

juga meminta DPD RI untuk mendorong kebijakan afirmatif guna meningkatkan akses pendidikan keagamaan serta memberikan dukungan kepada lembaga sosial keagamaan.

Selanjutnya, dalam laporan aspirasi untuk materi BULD, Sub Wilayah Barat I merekomendasikan pentingnya optimalisasi penataan ruang dan pengelolaan sampah. Untuk itu, DPD RI perlu mendorong penyederhanaan dan digitalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Dalam hal pengelolaan sampah, DPD RI perlu mendorong penggunaan teknologi pengelolaan modern serta regulasi terpadu lintas sektor,” terang Leni Haryati.

Sementara itu, dari Sub Wilayah Timur I, Al Hidayat Samsu mengusulkan kepada pemerintah agar menyusun perubahan terhadap peraturan pelaksana yang men-

jadi turunan dari UU Desa. Pengaturan tersebut harus disesuaikan secara kontekstual dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi desa, termasuk kebutuhan spesifik serta kearifan lokal.

Dalam lingkup Komite III, Al Hidayat Samsu menyatakan bahwa DPD RI perlu melakukan pengawasan atas UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Salah satu upayanya adalah mendorong para pemangku kepentingan untuk menyusun dan memperkuat Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (RAD-Pemuda) di setiap daerah. “Kita perlu mendorong stakeholder untuk menyusun dan memperkuat RAD-Pemuda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kepemudaan,” ujar senator dari Sulawesi Selatan itu. (\*)

# OJK dan BI Perlu Tingkatkan Pengawasan Pinjaman *Online*

Fandi Tri Prayogo

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Kondang Kusumaning Ayu ketika menyampaikan rekomendasi hasil reses Subwilayah Barat II terkait bidang kerja Komite IV, meminta DPD RI mendorong penyelesaian masalah bidang keuangan dan perbankan, khususnya menyangkut pengawasan pinjaman digital atau pinjaman *online* (pinjol).

“OJK dan Bank Indonesia menjadi aktor utama dalam kebijakan ini, khususnya menyangkut pengawasan pinjaman digital. Kementerian Kominfo dan PPATK juga harus bersinergi dalam menindak transaksi digital mencurigakan, termasuk mengawasi perputaran dana judi online dan situs ilegal,” kata senator dari Jawa Timur itu dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI, Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (15/4/2025).

Anggota DPD RI dari Papua Pegunungan Sopater Sam yang menyampaikan rekomendasi hasil reses Subwilayah Timur II, menyebutkan bahwa Komite IV harus fokus pada implementasi pengawasan kebi-



Anggota DPD RI Sopater Sam menyerahkan rekomendasi hasil reses Sub Wilayah Timur II. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

jakan Bank Indonesia, yang dinilai cenderung kompleks dan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat di daerah perlu diberi pemahaman yang lebih komprehensif.

“Untuk itu diperlukan sosialisasi, keterlibatan, serta pengawasan dari seluruh elemen masyarakat daerah. Akses informasi terkait kebijakan perbankan juga perlu diperluas agar masyarakat mampu memanfaatkan informasi tersebut demi meningkatkan literasi dan pendapatan ekonomi mereka,” kata Sopater.

Terkait bidang kerja Komite II, yaitu lingkungan hidup dan energi, Kondang Kusumaning Ayu meminta infrastruktur kelautan diprioritaskan dan tidak di-

masukkan dalam kebijakan efisiensi anggaran. “Ini bersifat mendesak karena berdampak luas bagi nelayan dan masyarakat pesisir serta ketahanan pangan sektor kelautan,” tegasnya.

Sedangkan Senator Sopater menekankan kerusakan lingkungan dan memperkuat perlindungan hukum. Menurutnya, di wilayah timur masih memiliki persoalan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal itu disebabkan lemahnya perlindungan hukum atas hak tanah warga, buruknya pengelolaan sampah, dan akses terhadap air bersih. “Maka diperlukan kebijakan berupa perlindungan lingkungan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana,” ujarnya. (\*)

# Azhari Cage Sampaikan Masalah Banjir Aceh Utara

M. Fathoni

Penulis

Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Aceh, Azhari Cage, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI, Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (15/4/2025). Salah satu isu utama yang ia soroti adalah banjir yang kerap melanda wilayah Aceh Utara.

“Ini adalah persoalan serius yang harus segera ditangani, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegas Azhari dalam sidang yang dipimpin Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, didampingi para Wakil Ketua: GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai.

Ia menjelaskan, Lhoksukon sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Utara sering dilanda banjir hingga tiga sampai empat kali dalam setahun. Banjir tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga memaksa ribuan warga mengungsi dan menghambat aktivitas perekonomian masyarakat.

“Pada Januari 2023, Badan



Anggota DPD RI Azhari Cage menyerahkan laporannya kepada Pimpinan DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Ini adalah persoalan serius yang harus segera ditangani, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Anggota DPD RI,  
Azhari Cage

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mencatat sebanyak 2.311 warga harus mengungsi akibat banjir, dengan ketinggian air mencapai tiga meter di sejumlah titik. Sementara pada Desember 2023, banjir kembali terjadi di 11 kecamatan dan 101 gampong (desa), memaksa 5.583 jiwa mengungsi dan melumpuhkan aktivitas

ekonomi masyarakat,” paparnya.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang, Azhari menyarankan agar dilakukan langkah-langkah konkret seperti pengerukan aliran Sungai (Krueng) Keureuto, pembangunan tanggul tebing di sepanjang aliran sungai, serta normalisasi sungai yang melintasi pusat pemerintahan Kabupaten Lhoksukon.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan banjir yang berulang di Aceh, khususnya di Aceh Utara. “Banjir ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dalam setahun bisa terjadi tiga hingga empat kali,” ujar Azhari, yang mendapat dukungan dari sejumlah senator yang hadir. (\*)

# Persiapan Pelaksanaan Haji 2025 Komite III DPD RI ke Arab Saudi

Betria Eriani

Penulis

**D**alam rangka pengawasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Daerah Kerja (Daker) Haji Makkah, Arab Saudi, Selasa (15/4/2025). Dalam kunjungan tersebut, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daker Makkah memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan demi kelancaran dan kenyamanan jemaah selama menjalani ibadah haji.

Perwakilan Daker Makkah, Zakaria Anshori, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan sejumlah kontrak penting, termasuk layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. “Kontrak akomodasi dan katering di Makkah sudah selesai. Kami bekerja sama dengan 56 penyedia layanan konsumsi. Di Madinah, kerja sama dilakukan dengan 21 perusahaan penyedia layanan makanan,” jelas Zakaria.

Ia menyebutkan, untuk layanan transportasi terdapat dua jenis armada yang digunakan. Armada pertama melayani perjalanan jemaah dari Makkah ke Madinah dan sebaliknya, dilayani oleh 12 perusahaan bus. Sedangkan



Ilustrasi penyelenggaraan ibadah haji. (Foto Istimewa)

layanan bus salawat yang digunakan untuk antar-jemput jemaah dari hotel ke Masjidil Haram juga telah siap beroperasi. Daker Makkah juga mempersiapkan fasilitas kesehatan, terutama dalam menangani jemaah lansia atau yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.

Anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang telah dilakukan oleh PPIH Daker Makkah. Namun, ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif kepada jemaah, terutama yang berkaitan dengan alur dan waktu pelaksanaan ibadah.

“Hal ini penting supaya jemaah bisa mengatur waktu makan, minum, dan ke toilet secara mandiri,” ujar Lia Istifhama.

Ia juga berharap akses terhadap air minum di hotel

mendapat perhatian. Lia menyarankan agar pihak hotel menyediakan dispenser air minum di setiap lantai guna memudahkan jemaah dalam memenuhi kebutuhan cairan, terutama di tengah cuaca panas di Tanah Suci. Terkait konsumsi, ia menilai perlu ada diversifikasi menu, seperti olahan ayam yang lebih bervariasi, agar jemaah tidak merasa bosan dan tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Melalui kunjungan langsung tersebut, Lia Istifhama berharap penyelenggaraan haji tahun 2025 menjadi lebih humanis, terorganisir, dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih mendalam bagi jemaah Indonesia.

“Kenyamanan dan keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Tentunya dengan harapan agar hak-hak jemaah terpenuhi dan pelayanan semakin berkualitas dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (\*)

# Komite III DPD RI Undang DKN Bahas Hak Penyandang Disabilitas

Arso P Nugroho

Penulis

**K**omite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam pemenuhan hak-haknya. Untuk itu, Komite III mengundang Komisi Nasional Disabilitas (KND) guna mendengarkan pandangan dan pendapat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar kelompok disabilitas.

“Berbagai tantangan dan permasalahan masih dihadapi untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan mereka tidak tertinggal dalam agenda pembangunan, sesuai dengan prinsip *No One Left Behind* dalam Sustainable Development Goals (SDGs),” kata Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, dalam rapat kerja di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Senator asal Papua Barat ini menegaskan, ada sejumlah hambatan dalam meningkatkan kapasitas dan marwah penyandang disabilitas. Salah satunya adalah masih terbatasnya pelibatan mereka dalam partisipasi publik, yang



Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama pimpinan DKN, usai menggelar rapat. Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kerap kali belum ramah dari sisi aksesibilitas, sarana, dan prasarana. Selain itu, stigma negatif dari masyarakat masih kuat terhadap kelompok disabilitas.

“Stigma masyarakat harus diubah. Masih banyak yang memandang penyandang disabilitas sebagai pihak yang patut dikasihani, bahkan dianggap tidak dapat hidup mandiri,” ujarnya.

Wakil Ketua KND, Deka Kurniawan, mengamini bahwa stigma negatif terhadap penyandang disabilitas masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, selama ini penyandang disabilitas sering diposisikan hanya sebagai objek, bukan subjek pembangunan yang memiliki hak yang setara.

“Pandangan ini harus diubah melalui peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak disabilitas. Mereka adalah manusia yang setara. Namun, kerap kali dianggap tidak berdaya. Stigma inilah yang harus kita hilangkan,” tegas Deka.

Filep juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang

berdampak pada KND. Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap kemampuan KND dalam menjalankan fungsinya secara optimal jika terus dibatasi oleh alokasi anggaran yang minim.

“Anggarannya sudah kecil, terkena efisiensi pula. Ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan fungsi KND dalam melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas,” kata Filep.

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, turut menegaskan perlunya dukungan yang lebih besar terhadap KND, terutama dalam aspek kelembagaan dan anggaran. “Saya miris melihat kecilnya anggaran yang diterima KND, dan masih harus terkena efisiensi. Kalau negara serius memberikan kesetaraan, maka KND seharusnya berada langsung di bawah Presiden. Intinya, kami mendukung KND untuk memiliki kedudukan yang terhormat, baik dari sisi struktur maupun kewenangannya,” pungkasnya. (\*)

# Perencanaan Tata Ruang Mutlak dalam Pembangunan



Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI bersama Pakar Tata Ruang Dwi Hariyawan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Hestiana Kiftia Sari**

Penulis

**P**erencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu persoalan utama dalam pembangunan daerah, seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan pemanfaatan lahan. Karena itu, perencanaan tata ruang menjadi hal yang krusial sebagai regulasi yang berfungsi sebagai pedoman penataan ruang dan acuan pelaksanaan pembangunan.

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar tata ruang, Kamis (17/4/2025), mengungkapkan bahwa perencanaan dan penataan ruang kini mengalami resentralisasi pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ia juga menyoroti

munculnya sejumlah persoalan lingkungan, seperti bencana alam, yang diduga kuat dipicu oleh kebijakan pembangunan yang melanggar prinsip-prinsip tata ruang.

“DPD RI memandang bahwa penataan ruang merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk menjamin dan mengharmonisasikan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang—baik kepentingan ekonomi, sosial, budaya, maupun ekologi secara luas,” ujar Andi.

Senator asal Aceh, Sudirman Haji Uma, menegaskan pentingnya keterlibatan badan riset dan lembaga geologi dalam proses perencanaan tata ruang. Menurutnya, tanpa data ilmiah yang kuat, sulit menentukan zona wilayah secara akurat.

“Bagaimana mungkin kita bisa membedakan zona-zona wilayah tanpa kehadiran

badan riset dan geologi? Biaya riset memang tidak murah, tapi kalau hanya sekadar justifikasi formalitas, apakah itu bisa dijadikan landasan dalam rencana tata ruang?” tegas Sudirman.

Pakar tata ruang, Dwi Hariyawan, menambahkan bahwa perencanaan tata ruang tidak bisa hanya berfokus pada *physical planning*, melainkan juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Penataan ruang dibutuhkan karena ruang semakin terbatas, sementara populasi terus meningkat.

“Penataan ruang harus menjamin keseimbangan ekonomi, sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Tapi kenyataannya, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan regulasi,” jelasnya.

Dwi juga menekankan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi pelanggaran, serta untuk mewujudkan ruang yang aman, produktif, nyaman, dan bebas dari ancaman bencana—baik alam maupun sosial.

“Tata ruang juga harus menyisakan ruang hijau demi masa depan anak cucu. Maka dari itu, pelaksanaannya tidak bisa hanya melibatkan ATR/BPN, tapi juga lintas sektor,” tutup Dwi Hariyawan. (\*)

# Revisi UU SJSN Didorong oleh Aspirasi Masyarakat dan Daerah

Betria Eriani

Penulis

**R**evisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) menjadi agenda prioritas yang tidak bisa ditunda. Selain telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 atas usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, inisiatif revisi ini juga didorong kuat oleh aspirasi masyarakat dan daerah.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kamis (17/05/2025), menjelaskan bahwa salah satu poin krusial dalam revisi UU ini adalah perluasan jangkauan jaminan sosial, khususnya untuk mencakup perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Langkah ini sejalan dengan meningkatnya angka kecelakaan LLAJ yang memberi dampak besar tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga korban.

“Data dari Asian Development Bank (ADB) menunjukkan kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ di Indonesia mencapai 2,9 – 3,1 persen dari Produk Domestik Bruto



Komite III DPD RI saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

(PDB), atau setara dengan Rp448 - 478 triliun pada tahun 2020. Ini menegaskan urgensi untuk menangani korban kecelakaan secara sistematis dan inklusif, termasuk dengan skema jaminan sosial nasional,” ujar Filep.

Senator asal Papua Barat ini juga menyoroti tingginya biaya tanggap darurat, perawatan kesehatan, serta trauma psikis yang diderita korban dan keluarga. Hal ini semakin memperkuat urgensi untuk memiliki penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor. Poin ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara itu, Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono, menjelaskan bahwa hasil investigasi KNKT menunjukkan bahwa risiko yang diha-

dapi pengguna transportasi tidak hanya terbatas pada kematian, tetapi juga meliputi cacat sementara, cacat permanen, serta trauma fisik dan psikologis. Kecelakaan transportasi berdampak tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat luas.

“Untuk itu, sangat penting memastikan bahwa sistem jaminan sosial bisa mengakomodasi kebutuhan korban kecelakaan transportasi dan keluarga mereka,” ujar Soerjanto.

Ia juga berharap revisi UU SJSN dapat memasukkan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai kecelakaan kerja, sehingga korban dapat menerima jaminan sosial yang memadai. “Saat ini, kami belum memiliki kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani kasus-kasus kecelakaan transportasi,” ungkapnya. (\*)



# Masalah Pembangunan di Daerah Masih Kompleks dan Multi-Sektor

Rini Sumarni

Penulis

**P**ermasalahan pembangunan di daerah masih kompleks dan bersifat multi-sektor. Permasalahan tersebut mencakup kemiskinan ekstrem, ketimpangan infrastruktur, rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM), serta ketidaksesuaian antara prioritas pusat dan daerah.

Demikian salah satu kesimpulan dari Focus Group Discussion (FGD) Pra-APBN Tahun 2026 yang diselenggarakan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025). FGD tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung.

Sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah dinilai masih lemah. Ketidakharmonisan kebi-

jakan dan keterlambatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dianggap

menyoroti pentingnya pendekatan yang inklusif dan realistis dalam penyusunan asumsi ekonomi makro. Proyeksi makro yang disusun

perlu memperhatikan faktor global dan domestik, serta dampaknya terhadap perencanaan fiskal nasional.

Peran DPD RI sebagai representasi daerah juga perlu diperkuat dalam perencanaan pembangunan nasional. FGD ini mempertegas komitmen DPD RI dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi daerah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026.

Rekomendasi terakhir dari FGD ini menegaskan bahwa Jawa Tengah merupakan wilayah strategis yang memerlukan dukungan khusus. Dengan

potensi geografis dan sektor unggulan yang kuat, Jawa Tengah membutuhkan perhatian lebih dalam bentuk alokasi anggaran, investasi, serta dukungan terhadap program-program strategis nasional. (\*)



(Majalah Senator)

menghambat efektivitas perencanaan pembangunan. Karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam FGD tersebut, kalangan akademisi juga

# APBN 2026 Harus Menjadi Perisai Gejolak Eksternal

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menyoroti situasi ekonomi global yang penuh tantangan saat ini, seperti kebijakan proteksionis Amerika Serikat yang berdampak pada ekspor Indonesia, melemahnya nilai tukar rupiah, dan tekanan terhadap pasar saham domestik.

Dengan kondisi ini, APBN 2026 harus didesain tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai perisai terhadap gejolak eksternal. “Kunci keberhasilan APBN terletak pada harmoni antara kebijakan pusat dan daerah. Program-program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan tidak akan efektif tanpa integrasi strategis di semua level pemerintahan,” tegas Tamsil dalam Focus Group Discussion (FGD) Pra-APBN Tahun 2026, di Semarang, Kamis (17/4/2025).

FGD itu diselenggarakan Komite IV DPD RI dalam rangka menyerap pandangan dan masukan dari akademisi serta pemangku kepentingan di daerah. Hasil FGD tersebut akan dijadikan DPD RI sebagai rekomendasi dalam



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan memberikan pertimbangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026.

Dalam FGD itu, Tamsil mengangkat isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama dalam penyusunan RAPBN. Di antaranya mengenai penguatan belanja daerah untuk sektor produktif seperti pertanian, pendidikan vokasi, dan infrastruktur dasar demi mendorong pertumbuhan berbasis potensi lokal. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah.

Tamsil menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung visi pembangunan nasional Asta

Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita adalah cetak biru pembangunan yang menjadikan daerah sebagai fondasi utama menuju kemakmuran bangsa. Karena itu, keberhasilan visi ini hanya dapat tercapai melalui penyesuaian program pembangunan nasional dengan kebutuhan dan potensi lokal.

“FGD ini bukan sekadar diskusi, tetapi upaya mengartikulasikan denyut kehidupan nyata di Jawa Tengah untuk memperkaya kebijakan nasional. DPD RI siap menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional. Kami berharap FGD ini menghasilkan rekomendasi yang konkret dan visioner bagi pembangunan Indonesia ke depan,” kata senator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu. (\*)

# Perlu Sinergisitas Selesaikan Masalah Reformasi Birokrasi

Arso P Nugroho

Penulis

**K**omite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrulloh, di Gedung DPD RI, Kamis (17/4/2025).

Rapat kerja tersebut membahas sejumlah isu penting, antara lain percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen kepegawaian, serta pelaksanaan sistem meritokrasi di birokrasi pemerintahan.

Komite I DPD RI menilai salah satu tantangan utama dalam reformasi birokrasi adalah penyelesaian status tenaga honorer dan pegawai non-ASN. Pemerintah telah menyiapkan strategi melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta optimalisasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Namun demikian, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, Komite I menilai implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kualiti



Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Menteri PANRB Rini Widyantini dan Kepala BKN Zudan Arif Fakhrulloh menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro BHM Setjen DPD RI)

“Diperlukan sinergisitas antara Kementerian PANRB, Komite I DPD RI, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan reformasi birokrasi berjalan sesuai visi yang telah ditetapkan.”

**Ketua Komite I DPD RI,  
Andi Sofyan Hasdam**

tas pelayanan publik yang belum merata, penerapan sistem merit yang belum optimal, dan status tenaga honorer yang belum terselesaikan. “Diperlukan sinergisitas antara Kementerian PANRB, Komite I DPD RI, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan reformasi birokrasi berjalan sesuai visi yang telah ditetapkan,” kata Ketua Komite I DPD RI, Andi

Sofyan Hasdam.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa dalam 10 tahun terakhir, rata-rata indeks reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

“Transformasi digital pemerintah berbasis arsitektur pemerintah digital menjadi pilar utama reformasi birokrasi tematik, dengan dampak yang luas bagi masyarakat. Prioritas utamanya mencakup layanan digital siklus hidup, penerimaan negara, layanan berusaha, dan belanja publik,” ujar Rini. (\*)

Siti Aseanti:

# Dari Ruang Bersalin ke Senayan

**Adhi Nugroho**

Penulis

**S**iti Aseanti, yang akrab disapa Bidan Sean, adalah seorang tenaga kesehatan yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2024–2029 mewakili Kalimantan Tengah. Latar belakangnya sebagai bidan di Kabupaten Kapuas memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Ia berhasil meraih kepercayaan publik dengan memenuhi syarat dukungan minimal 2.000 orang dan sebaran minimal di tujuh kabupaten/kota dalam verifikasi faktual oleh KPU Kalimantan Tengah.

Dalam pemilu 2024, Siti Aseanti terpilih sebagai salah satu dari empat senator yang mewakili Kalimantan Tengah di DPD RI. Ia menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa terpilihnya dirinya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan untuk mengabdikan kepada rakyat.

Di DPD RI, Siti Aseanti dipercaya sebagai Wakil Ketua II Badan Kehormatan (BK) untuk periode 2024–2029. Peran ini menunjukkan kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam menjaga etika dan integritas lembaga.

Sebagai anggota Komite IV DPD RI, Siti Aseanti aktif dalam pengawasan sektor keuangan. Ia melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan bahwa OJK melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, serta mendorong pengembangan sektor jasa keuangan yang sehat dan inklusif di daerah.

Kepedulian Siti Aseanti terhadap kesejahteraan aparat keamanan juga terlihat dari kunjungannya ke Pos TNI AL Kuala Kapuas selama bulan Ramadan. Dalam kunjungan ter-

sebut, ia mendengarkan aspirasi personel TNI AL dan memberikan bantuan sembako sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan mereka melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Siti Aseanti juga aktif dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia mengadakan kegiatan sosialisasi di Kabupaten Kapuas yang dihadiri oleh perwakilan organisasi masyarakat dan instansi, guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. (\*/berbagai sumber)



# RA Yashinta Sekarwangi Mega

Adhi Nugroho

Penulis

**R**A Yashinta Sekarwangi Mega adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terpilih mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai politisi muda yang energik, Yashinta dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat besar dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat DIY, khususnya dalam hal pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Lahir dan dibesarkan di Yogyakarta, Yashinta memiliki pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerahnya.

Sebagai anggota DPD RI termuda, Yashinta menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan ekonomi. Salah satu perhatian utama Yashinta adalah upaya peningkatan literasi keuangan di masyarakat, yang ia nilai sangat penting untuk mengurangi masalah pinjaman online ilegal dan judi online yang meresahkan masyarakat, khususnya kalangan muda. Yashinta sering mengadakan kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat untuk mendengarkan langsung keluhan warga dan merumuskan solusi yang tepat.

Yashinta juga dikenal seba-

gai politisi yang dekat dengan budaya lokal dan berkomitmen untuk melestarikannya. Salah satu metode yang ia tawarkan dalam sosialisasi literasi keuangan adalah dengan menggunakan pendekatan tradisional, yaitu getok tular (dari mulut ke mulut). Sebagai bagian dari upayanya mengintegrasikan budaya lokal dengan tantangan modern, Yashinta meyakini bahwa metode ini akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat yang ada di pedesaan dan daerah terpencil.

Selain fokus pada literasi keuangan, Yashinta juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia sering terlibat dalam berbagai aksi kemanusiaan, salah satunya adalah kegiatan bakti sosial yang melibatkan



pembagian kacamata gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama antara Yayasan Indonesia Melihat Nusantara dan berbagai mitra strategis lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut, Yashinta berharap dapat mengurangi kesenjangan sosial di daerahnya.

Sebagai anggota DPD RI, Yashinta juga berperan aktif dalam memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat DIY di tingkat legislatif. Ia menyadari bahwa meskipun DIY merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pendidikan yang tinggi, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam hal ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Yashinta terus berusaha untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan daerah-daerah yang kurang berkembang.

Dengan semangat kepemimpinan dan dedikasi tinggi terhadap pembangunan daerah, Yashinta Sekarwangi Mega telah membuktikan dirinya sebagai anggota DPD RI yang berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia menjadi contoh bahwa politisi muda dapat membawa perubahan positif dan menjadi jembatan antara masyarakat dan kebijakan pemerintah yang lebih inklusif. (\*/berbagai sumber)

# Hartono

Fandi Tri Prayogo

Penulis

**H**artono, yang dikenal dengan julukan “Pace Songkok Hijau”, adalah salah satu dari empat senator pertama yang mewakili Provinsi Papua Barat Daya di DPD RI untuk periode 2024–2029. Lahir dan besar di tanah Papua, ia telah mengabdikan diri dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, khususnya dalam pemberdayaan usaha kecil dan mikro (UKM). Sebagai pendiri beberapa Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Hartono telah berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal sejak tahun 1995.

Sebelum terjun ke dunia politik nasional, Hartono aktif dalam partai politik sejak era reformasi 1998 hingga 2020, dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sorong. Pengalaman ini memberinya wawasan mendalam tentang dinamika politik dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI didasarkan pada keinginannya untuk lebih fokus memperjuangkan aspirasi daerah secara independen, tanpa terikat

oleh kepentingan partai politik.

Dalam proses pencalonannya, Hartono menunjukkan komitmen kuat dengan menyerahkan lebih dari 1.500 dukungan pemilih yang tersebar di seluruh wilayah Sorong Raya, termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, dan Tambrauw. Langkah ini mencerminkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan perempuan.

Setelah terpilih, Hartono ditempatkan di Komite III DPD RI, yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ia berkomitmen untuk mendorong program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Barat Daya, dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan publik yang merata.

Hartono juga dikenal sebagai sosok yang aktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan pusat. Ia percaya bahwa

kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk mempercepat pembangunan di provinsi termuda ini. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya sinergi antara senator, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagai senator, Hartono bertekad untuk menjadi “jembatan emas” yang menghubungkan aspirasi masyarakat Papua Barat Daya dengan kebijakan nasional. Dengan latar belakang yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi dan pengalaman politik yang luas, ia berharap dapat membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi daerah yang diwakilinya. (\*/berbagai sumber)



# Blangkon: Warisan Leluhur di Ujung Kepala

Theresia Oktavina

Penulis

**B**langkon adalah penutup kepala tradisional pria Jawa yang terbuat dari kain batik yang dilipat dan dijahit membentuk topi siap pakai. Dalam budaya Jawa, blangkon bukan sekadar aksesoris, melainkan simbol kehormatan dan kewibawaan pria. Kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang paling mulia, sehingga penutup kepala memiliki makna penting dalam menunjukkan martabat seseorang. Blangkon juga mencerminkan nilai-nilai filosofis, seperti pengendalian diri dan kesopanan.

Asal-usul blangkon dapat ditelusuri dari cerita legenda Aji Saka, yang mengisahkan penggunaan kain penutup kepala yang dapat menutupi seluruh tanah Jawa. Selain itu, pengaruh budaya Islam, khususnya dari pedagang Gujarat yang mengenakan sorban, turut memengaruhi perkembangan blangkon. Awalnya, pria Jawa menggunakan iket, yaitu kain panjang yang dililit di kepala. Seiring waktu, iket berkembang menjadi blangkon yang lebih praktis dan siap pakai.

Terdapat berbagai jenis blangkon yang mencerminkan identitas regional, seperti blangkon gaya Yogyakarta



yang memiliki mondolan (tonjolan) di bagian belakang, dan blangkon gaya Surakarta yang bagian belakangnya rata (trepes). Mondolan pada blangkon Yogyakarta awalnya berfungsi untuk menampung gelungan rambut panjang pria, sementara blangkon Surakarta mencerminkan kebiasaan pria berambut pendek.

Dalam perkembangannya, blangkon tidak hanya digunakan dalam upacara adat atau acara resmi, tetapi juga menjadi bagian dari *fashion* dan cinderamata. Di daerah seperti Serengan, Solo, banyak pengrajin blangkon yang meneruskan tradisi pembuatan blangkon secara turun-temurun. Mereka memproduksi berbagai jenis blangkon, termasuk gaya Jogja, Madura, Bali, Sunda, dan Betawi, dengan menggu-

nakan kain modang sebagai bahan utama.

Upaya pelestarian blangkon juga dilakukan melalui program-program pemerintah, seperti “Lapak Ganjar” yang membantu pengrajin blangkon dari Batang, Jawa Tengah, untuk memasarkan produk mereka ke pasar nasional. Melalui program ini, kerajinan blangkon berhasil merambah pasar luar Jawa, seperti Medan, Palembang, dan Jambi.

Dengan berbagai upaya pelestarian dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, blangkon tetap menjadi simbol identitas budaya Jawa yang kaya akan nilai filosofis dan estetika. Keberadaannya yang terus dipertahankan menunjukkan pentingnya menjaga warisan budaya sebagai bagian dari jati diri bangsa. (berbagai sumber)

## Blangkon: An Ancestral Heritage on the Head



Theresia Oktavina

Written

**B**langkon is a traditional Javanese men's headwear made from batik fabric that is folded and sewn into a ready-to-wear cap. In Javanese culture, blangkon is more than just an accessory—it is a symbol of a man's honor and dignity. The head is considered the most noble part of the body, thus head coverings possess important meaning on one's dignity. Blangkon also reflects philosophical values such as self-control and decency.

The origins of blangkon can be traced back to the legend of Aji Saka, a tale about the use of a headwear cloth capable to cover the entire land of Java. Additionally, the influence of Islamic culture—particularly from Gujarati traders who wore turbans—also influenced the

development of blangkon. Originally, Javanese men wore an *iket*, a long cloth wrapped around the head. Over time, the *iket* evolved into the more practical and ready-to-wear blangkon.

There are various types of blangkon that reflect regional identities, such as Yogyakarta style with a *mondolan* (a protruding knot) at the back, and Surakarta style with a flat back (even). The *mondolan* in Yogyakarta's blangkon was originally designed to accommodate long, coiled hair of men, while Surakarta blangkon reflects the habit of men keeping their hair short.

Over the years, blangkon has not only been worn during traditional ceremonies or formal events, but has also become part of fashion and souvenirs. In places like Serengan, Solo, many blangkon craftsmen continue the tradition of blangkon-making through generations.

They produce various styles of blangkon, including Jogja, Madura, Bali, Sunda, and Betawi using *modang* cloth as the main material.

Efforts to preserve the blangkon tradition are also exercised through government programs such as “Lapak Ganjar,” which helps blangkon artisans from Batang, Central Java, market their products nationwide. Through the program, blangkon craftsmanship has penetrated markets beyond Java, including Medan, Palembang, and Jambi.

Through preservation effort and adaptation to modern trends, blangkon remains a prominent symbol of Javanese cultural identity, rich in philosophical and aesthetic values. Its preserved existence demonstrates the importance of safeguarding cultural heritage as an integral part of national identity. (various sources)



# Istana Siak: Warisan Kejayaan Melayu di Tepi Sungai Siak



Foto Wikipedia

**Lela Sadiyah**

Penulis

**K**abupaten Siak, yang terletak di Provinsi Riau, menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa. Salah satu destinasi wisata paling ikonik di wilayah ini adalah Istana Siak Sri Indrapura, atau yang lebih dikenal sebagai Istana Asserayah Hasyimiyah. Dibangun pada abad ke-19 oleh Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, istana ini menjadi lambang kejayaan Kesultanan Siak yang pernah menjadi salah satu kekuatan politik dan ekonomi yang penting di bagian timur Sumatera.

Istana Siak berdiri megah di tepi Sungai Siak dengan arsitektur yang memadukan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Pilar-pilar besar, jen-

delah kaca patri, dan ukiran-ukiran halus menghiasi bangunan yang dulunya menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Di halaman istana terdapat meriam tua dan taman yang rindang, menciptakan suasana yang sejuk dan anggun, mengajak pengunjung seolah kembali ke masa lalu yang penuh wibawa dan kearifan lokal.

Memasuki ruang dalam istana, pengunjung akan disambut oleh koleksi benda-benda bersejarah seperti singgasana emas, pakaian kebesaran sultan, alat musik klasik seperti komet, hingga dokumen-dokumen resmi kerajaan. Salah satu yang paling menarik adalah keberadaan gramofon buatan Jerman yang konon hanya ada dua di dunia, menandakan kemajuan budaya dan

hubungan internasional Kesultanan Siak di masa lampau.

Selain nilai sejarahnya, Istana Siak juga menjadi pusat kebanggaan masyarakat setempat karena berhasil mempertahankan identitas budaya Melayu dalam arus modernisasi. Setiap tahun, istana ini menjadi lokasi utama berbagai acara adat dan kebudayaan, seperti Festival Siak Bermadah dan peringatan Hari Jadi Kabupaten Siak, yang semakin memperkuat daya tariknya sebagai destinasi wisata budaya dan edukasi.

Fasilitas pendukung di sekitar kawasan istana pun cukup lengkap. Terdapat museum kecil, pusat informasi wisata, toko cenderamata, serta dermaga kecil untuk menyusuri Sungai Siak dengan perahu wisata. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan revitalisasi dan promosi agar warisan budaya ini tetap lestari dan dikenal lebih luas oleh masyarakat nasional maupun internasional.

Bagi siapa saja yang ingin menyaksikan jejak kejayaan kerajaan Melayu sekaligus menikmati keindahan arsitektur klasik yang menawan, Istana Siak adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Ia bukan sekadar bangunan tua, melainkan penjaga sejarah, identitas, dan semangat kebudayaan yang terus hidup di hati masyarakat Siak hingga hari ini. (\*)

# Siak Palace: A Legacy of Malay Glory by the Siak River

Lela Sadiyah

Written

**S**iak Regency, located in Riau Province, holds an extraordinary wealth of history and culture. One of the most iconic tourist destinations in the region is the Siak Sri Indrapura Palace, also

known as Asserayah Hasyimiyah Palace. Built in the 19th century by Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, the palace symbolizes the glory of the Siak Sultanate, which once stood as a major political and economic power in eastern Sumatra.

The Palace stands majestically on the banks of the Siak River, displaying combined architecture of Malay, Arab, and European. Large columns, stained-glass windows, and intricate carvings adorn this former center of royal governance. In the courtyard are old cannons and a lush garden, creating a serene and noble atmosphere, and inviting visitors to retrace the past filled with dignity and local wisdom.

Entering the palace court, visitors are welcome by a collection of historical artifacts, including a golden throne, royal garments, traditional



Foto Kompas Regional

musical instruments like the kometa, and official royal documents of the kingdom. One of the most fascinating items is a German-made gramophone, said to be one of the only two existing in the world, reflecting the sultanate's culture prominence and international relationship in the past.

Besides its historical value, the palace is also the pride of the local, who have succeeded in preserving Malay cultural identity amidst modernization current. Every year, the palace becomes the primary venue for diverse customary and cultural events such as Siak Bermadah Festival and Siak Regency's anniversary celebration, further strengthening its attraction as a cultural and educational tourist destination.

Supporting facilities surrounding the palace are adequately available. There is a small museum, a tourist information center, souvenir shops, and a minor pier serving joy boat rides along the Siak River. The local administration continues endeavouring to revitalize and promote the cultural heritage to remain preserved and be widely known both nationally and internationally. For everyone seeking to witness the legacy of a grand Malay kingdom and admire the elegance of its enchanting classical architecture, Siak Palace is a must-visit destination. It is more than just an old building—it is a living guardian of history, identity, and cultural courage that continues to thrive in the hearts of Siak's people today. (\*)

# Keajaiban Danau Sentani: *Lukisan Alam di Timur Indonesia*



Danau Sentani di Papua (Foto Antara)

**Theresia Oktavina**

Penulis

**D**anau Sentani, terletak di bawah lereng Pegunungan Cyclops di Papua, Indonesia, merupakan danau terbesar di provinsi ini dengan luas sekitar 9.360 hektare dan berada pada ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Keindahan alamnya yang memukau menjadikannya destinasi wisata unggulan bagi para pelancong yang mencari ketenangan dan panorama alam yang menakjubkan.

Dikelilingi oleh perbukitan hijau dan 22 pulau kecil, Danau Sentani menawarkan pemandangan yang mempesona. Wisatawan dapat menyewa perahu un-

tuk menjelajahi danau dan mengunjungi pulau-pulau tersebut, seperti Pulau Ayapo yang terkenal. Aktivitas seperti menyelam, memancing, berenang, dan ski air juga tersedia bagi pengunjung yang ingin merasakan petualangan di danau ini.

Selain keindahan alamnya, Danau Sentani juga kaya akan budaya dan tradisi lokal. Terdapat 24 desa di sekitar danau yang mempertahankan kesenian tradisional seperti lukisan kulit kayu dan lukisan batu, yang dianggap sebagai hasil kesenian terbaik di Papua.

Setiap tahun, Festival Danau Sentani diadakan untuk merayakan kekayaan budaya dan keindahan alam danau ini. Festival ini

menampilkan pertunjukan seni, tarian tradisional, dan pameran kerajinan tangan, menarik wisatawan dari berbagai penjuru untuk merasakan atmosfer budaya yang otentik.

Danau Sentani juga memiliki nilai sejarah yang signifikan. Di dekat danau terdapat tugu Jenderal Douglas MacArthur, peninggalan dari era Perang Dunia II, yang menjadi saksi bisu peristiwa sejarah penting di wilayah ini.

Dengan kombinasi keindahan alam, kekayaan budaya, dan nilai sejarahnya, Danau Sentani merupakan destinasi yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang ingin merasakan pesona Papua yang autentik dan memikat. (\*berbagai sumber)

# *The Wonders of Lake Sentani: A Natural Painting in Eastern Indonesia*



Sentani Lake in Papua (Foto Osc.Medcom.id)

**Theresia Oktavina**

Written

**L**ake Sentani, located at the foot of the Cyclops Mountain-range in Papua, Indonesia, is the largest lake in the province, covering an area of approximately 9,360 hectares and situated at an altitude of 75 meters above sea level. Its breathtaking scenic view makes it a prime tourist destination for tourists seeking tranquillity and stunning landscapes.

Surrounded by lush hills and dotted with 22 isles, Lake Sentani offers mesmerizing scenery. Visitors can rent boats to explore the lake

and visit the isles, such as the famous Ayapo Island. Activities like diving, fishing, swimming, and water skiing are also available for those looking for adventure on the lake.

Besides its natural beauty, Lake Sentani is rich in local culture and traditions. There are 24 villages surrounding the lake that preserve traditional arts such as bark paintings and stone paintings, which are considered as the finest art crafts in Papua.

Each year, the Lake Sentani Festival is held to celebrate the cultural richness and natural scenery of the lake. The festival features art performances, traditional

dances, and craft exhibitions, attracting tourists from everywhere to experience the authentic cultural atmosphere.

Lake Sentani also holds significant historical value. Nearby stands the General Douglas MacArthur Monument, a relic from World War II, which is a silent witness to important historical events in the area.

With the combination of natural beauty, cultural wealth, and historical significance, Lake Sentani is a must-visit destination for anyone seeking to experience the authentic and captivating charm of Papua. (various sources)

# Lawar: Cita Rasa yang Menyatu dengan Budaya Bali



Lawar, Bali (Foto: Kompas.com)

**Theresia Oktavina**

Penulis

**D**i antara ragam kuliner tradisional Bali, Lawar menempati posisi istimewa—bukan hanya sebagai hidangan, tetapi juga sebagai simbol adat, budaya, dan kehidupan spiritual masyarakat Bali. Lawar adalah sajian yang terbuat dari campuran sayuran, kelapa parut, daging cincang, dan aneka rempah khas Bali yang sarat rasa dan makna. Dalam setiap sendoknya, Lawar menyuguhkan harmoni rasa gurih, pedas, dan sedikit manis, berpadu dalam tekstur yang unik dan menggugah selera.

Lawar bukanlah masakan biasa yang bisa dibuat sembarangan. Ia hadir dalam banyak upacara adat, termasuk odalan (perayaan hari jadi pura), potong gigi, hingga pernikahan.

Setiap keluarga atau desa memiliki versi Lawar-nya sendiri, dengan pilihan bahan yang beragam mulai dari Lawar Ayam, Lawar Kacang Panjang, hingga Lawar Nangka. Bahkan ada Lawar Merah yang menggunakan darah segar sebagai campuran, dan Lawar Putih yang dibuat tanpa darah untuk keperluan ritual bersih dan suci.

Yang menarik, proses pembuatan Lawar biasanya dilakukan secara gotong royong. Para pria berkumpul di dapur desa atau halaman rumah, memotong daging, meracik bumbu, dan mengaduk bahan dalam wadah besar dengan tangan. Aktivitas ini bukan hanya memasak, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, tukar cerita, dan bagian dari kebersamaan yang kuat di masyarakat Bali.

Bumbu Lawar menggunakan

base genep, campuran rempah lengkap khas Bali yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, cabai, terasi, dan berbagai bahan lain yang ditumbuk halus. Rempah inilah yang memberikan kekayaan rasa dan aroma pada Lawar. Disajikan bersama nasi putih dan kadang dilengkapi dengan sate lilit atau jukut ares, Lawar menjadi hidangan yang sempurna, mengenyangkan sekaligus memuaskan.

Meskipun awalnya hanya dikenal dalam lingkup lokal dan upacara adat, kini Lawar sudah menjadi menu yang umum dijumpai di warung makan dan restoran khas Bali. Wisatawan yang datang pun banyak yang penasaran mencicipi rasa otentik Lawar, meskipun beberapa versi seperti yang menggunakan darah mungkin memerlukan keberanian tersendiri. Namun itulah keunikan kuliner Bali: berani dalam rasa dan jujur dalam tradisi.

Lebih dari sekadar makanan, Lawar adalah representasi dari keseimbangan hidup: antara manusia dan alam, antara tradisi dan kehidupan modern. Dalam Lawar, setiap bahan dan bumbu memiliki peran, seperti halnya setiap individu dalam komunitas Bali. Maka, ketika mencicipi Lawar, kita tidak hanya menikmati kelezatan rasa, tetapi juga menyentuh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Bali hingga kini. (\*/berbagai sumber)

# Lawar: A Taste Blended with Balinese Culture

Theresia Oktavina

Written

**A**mong the many traditional Balinese dishes, Lawar holds a special place—not just as a meal, but as a symbol of custom, culture, and the spiritual life of the Balinese people. Lawar is made from a mixture of vegetables, grated coconut, minced meat, and various Balinese spices, offering a rich taste and deep cultural meaning. Each spoonful delivers a harmony of savory, spicy, and slightly sweet flavors, combined with a unique and appetizing texture.

Lawar is not an ordinary dish that can be made casually. It is often served during traditional ceremonies, such as *odalan* (temple anniversary), tooth filing rituals, and weddings. Every family or village has its own version of Lawar, using different ingredients—ranging from Lawar Ayam (chicken), Lawar Kacang Panjang (long beans), to Lawar Nangka (young jackfruit). There is even Lawar Merah, which includes fresh blood as an ingredient, and Lawar Putih, a bloodless version used for sacred and cleansing rituals.

Interestingly, the preparation of Lawar is usu-



ally done communally. Men gather in the village kitchen or home courtyards to chop meat, mix spices, and stir large bowls of ingredients by hand. This activity is more than just cooking—it is a time for socializing, storytelling, and strengthening the strong sense of togetherness in Balinese society.

The spices used in Lawar are based on *base genep*, a complete Balinese spice mix made from shallots, garlic, galangal, ginger, turmeric, chili, shrimp paste, and other finely ground ingredients. These spices bring richness in flavor and aroma to the dish. Served with white rice and often accompanied by *sate lilit* or *jukut ares* (banana stem soup), Lawar becomes a complete, satisfying, and fulfilling meal.

Though it was originally limited to local and cer-

emonial settings, Lawar has now become a common menu item found in Balinese eateries and traditional restaurants. Tourists are often curious to taste its authentic flavor, although some variations—like those using blood—might require a bit of courage. But that's the uniqueness of Balinese cuisine: bold in taste and honest in tradition.

More than just food, Lawar represents the balance of life: between humans and nature, between tradition and modern living. In Lawar, every ingredient and spice has its role, just as every individual has their place in the Balinese community. So, when we taste Lawar, we are not only savoring its deliciousness, but also embracing the values that continue to thrive in Balinese society today. (\*/various sources)

# Dodol Garut: Cita Rasa Legendaris dari Tanah Priangan



Foto RRI

Rini Sumarni

Penulis

**K**etika menyebut nama Garut, satu hal yang langsung terlintas di benak banyak orang adalah dodol. Ya, Dodol Garut bukan sekadar makanan manis, melainkan sudah menjadi ikon kuliner daerah yang melegenda. Makanan khas ini telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda dan hingga kini tetap menjadi oleh-oleh favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke kabupaten yang terletak di kaki Gunung Cikuray ini.

Dodol Garut dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti tepung ketan, gula aren, dan santan, namun diolah dengan teknik tradisional yang mem-

butuhkan waktu dan ketelatenan tinggi. Adonan dodol harus diaduk secara terus-menerus dalam kuali besar selama berjam-jam agar menghasilkan tekstur yang kenyal, halus, dan tidak mudah basi. Proses inilah yang menjadikan Dodol Garut bukan hanya lezat, tetapi juga sarat nilai tradisi.

Seiring perkembangan zaman, varian Dodol Garut pun semakin beragam. Selain rasa original, kini hadir pula dodol dengan rasa durian, cokelat, stroberi, bahkan kopi dan nangka. Kemasan dodol juga makin modern dan menarik, membuatnya cocok sebagai buah tangan maupun suguhan dalam berbagai acara. Namun

di balik inovasi rasa dan tampilan, dodol rasa original tetap menjadi primadona yang paling dicari.

Keistimewaan Dodol Garut tak hanya pada rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut, tetapi juga pada aroma khas yang menggugah selera. Dodol ini tidak terlalu lengket di tangan, mudah dipotong, dan terasa ringan di mulut. Cocok disantap kapan saja, baik sebagai camilan ringan, pendamping minum teh, maupun hidangan saat lebaran dan hari-hari besar lainnya.

Sentra produksi Dodol Garut tersebar di beberapa daerah seperti Kecamatan Tarogong, Samarang, dan Banyuresmi. Banyak industri rumah tangga yang secara turun-temurun mengolah dodol dengan resep warisan keluarga. Bahkan, tak sedikit pengusaha muda Garut yang kini mengangkat dodol sebagai produk UMKM unggulan yang dipasarkan hingga ke mancanegara.

Sebagai kuliner kebanggaan Garut, Dodol bukan hanya menghadirkan kenikmatan rasa, tapi juga menyimpan kisah panjang tentang kearifan lokal, kerja keras, dan cinta terhadap tradisi. (\*)

# Dodol Garut: A Legendary Taste from the Land of Priangan



Foto Lzd

**Rini Sumarni**

Written

**W**hen mentioning Garut, one thing that immediately comes across the mind of many people is dodol. Indeed, Dodol Garut is not just a sweet delight—it has become a legendary culinary icon of the region. This traditional delicacy has been known since the Dutch colonial era and remains a favourite souvenir for tourists visiting the regency nestled at the foot of Mount Cikuray.

Dodol Garut is made of simple ingredients such as glutinous rice flour, palm sugar, and coconut milk, yet it is processed with traditional technique that requires time and great patience. The dodol mixture must be stirred continuously in a large cauldron for hours to produce its texture which is chewy, smooth and stale-resistant. The meticulous process makes Dodol Garut not only delicious but also full of traditional value.

Along with the passage of time, Variant of Dodol garut

becomes more diverse. Besides the original taste, there are now Dodol with new flavours such as durian, chocolate, strawberry, even coffee and jackfruit. The packaging has also become more modern and attractive, turning it suitable for a gift or a snack for various occasions. Nevertheless, despite the innovation on flavor and packaging, the original flavour remains the most sought-after prima donna.

The uniqueness of Dodol Garut lies not only in its sweet taste and soft texture, but also in its distinctly appetizing aroma. It is not too sticky to the touch, easy to cut, and light on the palate. It is a perfect snack to enjoy anytime—as a light snack, a companion to tea, or a festive treat during Eid and other celebrations.

Dodol Garut production centers are spread across several areas, such as Tarogong, Samarang, and Banyuresmi sub-districts. Many home industries traditionally produce dodol using family recipe heritage. In fact, many young Garut entrepreneurs are now promoting dodol as a leading SME product, even exporting it to international markets.

As a culinary pride of Garut, Dodol is more than just a nice taste sensation—it carries a long story of local wisdom, hard work, and a deep love for tradition. (\*)



# KORUPSI DI INDONESIA SEPERTI BUTIR-BUTIR PASIR DI RODA

Oleh:  
Sugeng Budiharsono dan Lalu Niqman Zahir \*)

**A**rtikel yang ditulis oleh Asiye Tutuncu dan Yasar Bayraktar (2024) berjudul “*The Effect of Democracy and Corruption Paradox on Economic Growth: MINT Countries*” menjadi refleksi penting bagi Indonesia. Studi ini menganalisis pengaruh demokrasi dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di empat negara MINT (Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki) selama periode 1975–2022. Hasilnya, demokrasi terbukti berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh negara MINT. Namun, korupsi memberikan dampak berbeda: di Nigeria dan Turki, korupsi dianggap sebagai “pelumas roda” yang justru memfasilitasi pertumbuhan; sementara di Indonesia dan Meksiko, korupsi justru berperan sebagai “pasir pada roda” yang menghambat pertumbuhan.

Temuan ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kebijakan di Indonesia, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Apalagi jika Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya bukan lagi sekadar pilihan,

tapi syarat mutlak agar cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Dalam konteks global, perang dagang yang dipicu Presiden Donald Trump terhadap 160 negara termasuk Indonesia juga menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem dan tata kelola, terutama dalam hal korupsi.

Selama satu dekade terakhir (2014–2024), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 relatif stagnan di kisaran 5%, kecuali saat pandemi COVID-19. Sebaliknya, pada era Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi sempat menembus angka 6% di beberapa tahun. Padahal, saat itu Indonesia masih dalam proses pemulihan dari krisis multidimensi tahun 1998. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan dan integritas dalam tata kelola publik sangat menentukan keberhasilan ekonomi.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dari Transparency International selama 2014–2024 juga menunjukkan kinerja yang memprihatinkan. Meski sempat naik ke angka 40 pada 2019, skor CPI Indonesia kemudian merosot kembali ke 34 pada 2021–2023, sama seperti di akhir era SBY. Penurunan ini menjadi sinyal

memburuknya persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, OCCRP (*Organized Crime and Corruption Reporting Project*) menjadikan Presiden Jokowi sebagai finalis pemimpin dunia yang paling terlibat dalam praktik kejahatan terorganisasi dan korupsi pada 2024, meskipun tuduhan itu telah disanggah oleh Jokowi.

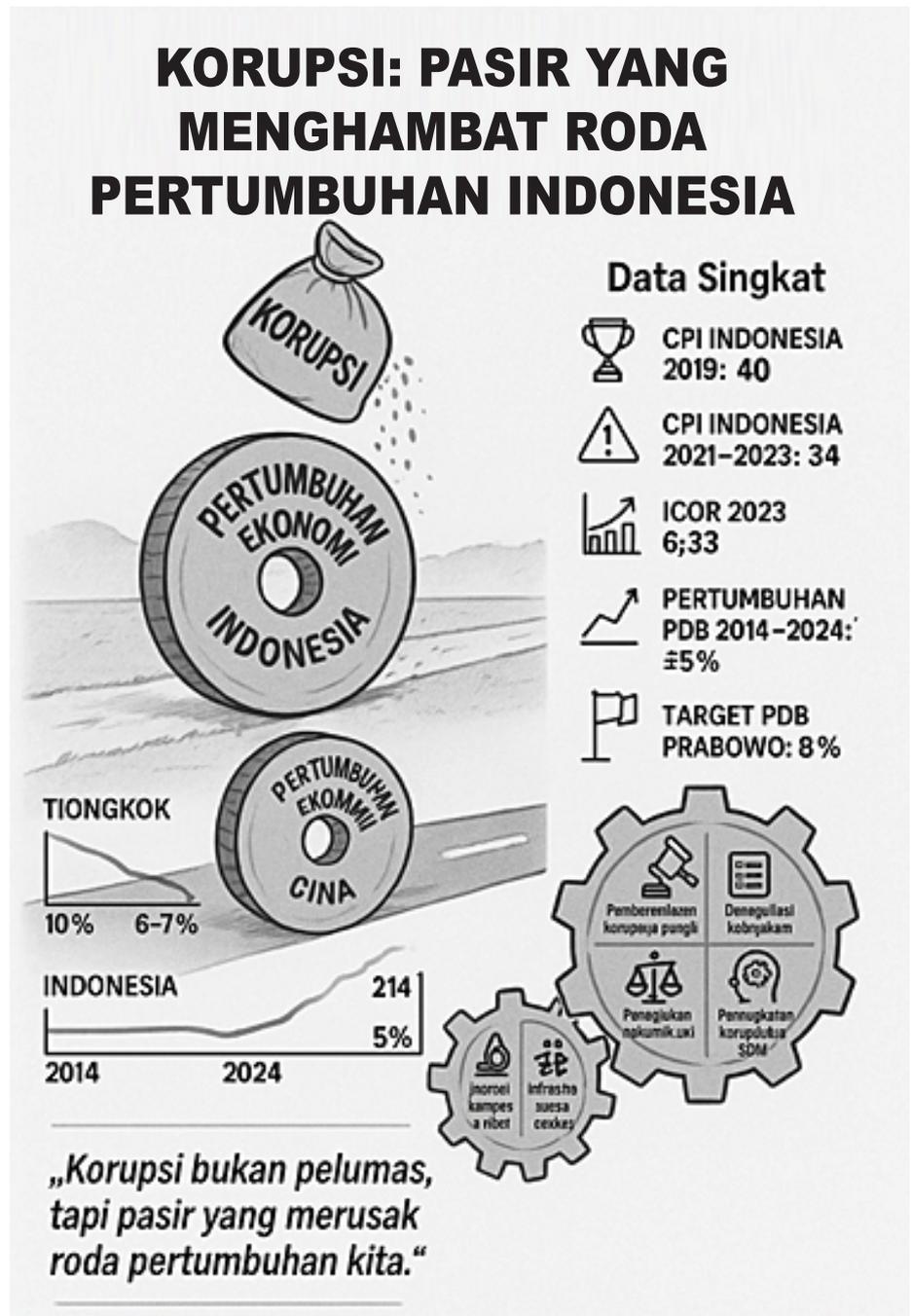
Korupsi di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama ketidakefisienan ekonomi, selain lemahnya kualitas sumber daya manusia, buruknya tata kelola, rendahnya inovasi, dan terbatasnya infrastruktur. Dampaknya adalah tingginya biaya ekonomi, yang tercermin dalam nilai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* tahun 2023 yang mencapai 6,33. Nilai ini menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di kisaran 5%, tertinggal dari negara-negara seperti Tiongkok yang pernah mencapai pertumbuhan di atas 10% dalam dekade 2000–2010.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama dua dekade terakhir menunjukkan pola yang menarik. Dari 2000–2010, ekonomi Tiongkok

kok tumbuh di atas 10% per tahun. Periode berikutnya (2010–2019), pertumbuhan melambat ke 6–7%, dan selama pandemi COVID-19 sempat turun menjadi 2,2% pada 2020. Namun, pada kuartal akhir 2024, pertumbuhan ekonomi Tiongkok kembali meningkat menjadi 5,4%. Ini membuktikan bahwa efisiensi dan produktivitas merupakan kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi—sesuatu yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Di tengah perang dagang global dan meningkatnya hambatan non-tarif atas nama keberlanjutan seperti EUDR, peningkatan daya saing Indonesia tidak bisa ditawar lagi. Daya saing hanya bisa dicapai jika ekonomi efisien, bebas dari pungli dan korupsi, memiliki tata kelola yang bersih, SDM yang unggul, serta infrastruktur yang mendukung. Semua pemangku kepentingan harus menjadikan kondisi global saat ini sebagai momentum untuk bersatu memperbaiki negeri.

Untuk itu, ada enam strategi kunci yang bisa diterapkan: *pertama*, pemberantasan korupsi dan pungutan liar secara menyeluruh, termasuk menysasar elite penguasa dan pengusaha besar; *kedua*, deregulasi kebijakan yang menyeluruh dan konsisten; *ketiga*, penegakan hukum yang kuat dan berwibawa; *keempat*, peningkatan kompetensi SDM terutama di sektor digital, pertanian cerdas, hiliri-



sasi industri, dan kesehatan modern; *kelima*, penguatan kapasitas inovasi di perguruan tinggi dan lembaga penelitian; serta *keenam*, pembangunan infrastruktur cerdas yang terintegrasi antara fisik dan digital.

Jika keenam strategi ini dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh, maka daya saing barang dan jasa Indonesia akan meningkat secara signifikan. Ini akan mendorong

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global. Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud bila semua pihak bersatu untuk membangun sistem yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

\*) Pendiri dan peneliti senior Nusantara Institute for Sustainable Development (NAISD)



# PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Mengucapkan

## *Hari Otonomi Daerah*



25 April 2025



### MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

